



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.
7. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah rencana kerja 5 (lima) tahunan ditingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung tercapainya TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
8. Laporan Tahunan TPB adalah Laporan untuk evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Sekretariat TPB Provinsi yang selanjutnya disebut sekretariat Daerah TPB Provinsi berkedudukan di Bappeda dan Litbang.
10. Tim Koordinasi TPB, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 3

Sistematika RAD TPB meliputi:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Kondisi pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB;
- c. Bab III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB ;
- d. Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Bab V Penutup.

### Pasal 4

RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 5

RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2021-2026.

## BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 April 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. UDAU ROBINSON, M.Si	PIE. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
2	RUDIANTO, S.Pi, M.Si	KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG	

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN TAHUN 2021-2026

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 selesai disusun. RAD TPB/SDGs ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Tahun 2021-2026 disusun sebagai dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah dan nonpemerintah untuk mendukung pencapaian target TPB/SDGs di Kalimantan Utara. Penyusunan RAD SDGs Tahun 2021-2026 mengacu pada Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II yang merujuk pembaharuan Metadata UNSTAT.

Dokumen RAD memiliki periode yang sama dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Masukan utama penentuan target untuk indikator TPB diperoleh dari RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Selain itu, dimuat juga dukungan rencana program dan kegiatan dari nonpemerintah baik dari lembaga kemasyarakatan, filantropi, academia, maupun dunia usaha/perusahaan.

Dalam pencapaian target TPB melibatkan multipihak baik dari pemerintah maupun nonpemerintah dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi. Proses penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara dilakukan secara inklusif dengan menggunakan metode pertemuan secara online maupun offline. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, Desember 2021

Kepala Bappelitbang  
Provinsi Kalimantan Utara



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Keselarasannya Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD I-1
1.2	Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs I-10
1.3	Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs I-11
1.4	Pembiayaan TPB/SDGs I-12
1.5	Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs I-12
1.6	Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs I-13
<b>BAB II</b>	<b>KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs</b>
2.1	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun II-3
2.2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan II-10
2.3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia II-16
2.4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua II-25
2.5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan II-34
2.6	Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak II-43
2.7	Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern II-51
2.8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan II-55
2.9	Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi II-63
2.10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara II-69
2.11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan II-76
2.12	Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan II-84
2.13	Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan II-90



2.14	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	II-94
2.15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	II-99
2.16	Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	II-106
2.17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	II-117
2.18	Tantangan dan Kendala Pelaksanaan TPB/SDGs	II-126
<b>BAB III</b>	<b>TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs</b>	<b>III</b>
3.1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	III-8
3.2	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	III-17
3.3	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	III-24
3.4	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	III-33
3.5	Tujuan 5 Kesetaraan Gender	III-42
3.6	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	III-45
3.7	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	III-48
3.8	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	III-50
3.9	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	III-57
3.10	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	III-60
3.11	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	III-68
3.12	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	III-74
3.13	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	III-77
3.14	Tujuan 14 Ekosistem Lautan	III-82
3.15	Tujuan 15 Ekosistem Daratan	III-85
3.16	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	III-89
3.17	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	III-95
<b>BAB IV</b>	<b>PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>IV</b>
4.1	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	IV-1
4.2	Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs	IV-5
4.3	Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	IV-5
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>V</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	I-7
Tabel 2.1	Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021	II-1
Tabel 2.2	Capaian Tujuan 1 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-5
Tabel 2.3	Capaian Tujuan 2 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-12
Tabel 2.4	Capaian Tujuan 3 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-18
Tabel 2.5	Capaian Tujuan 4 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-27
Tabel 2.6	Capaian Tujuan 5 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-37
Tabel 2.7	Capaian Tujuan 6 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-46
Tabel 2.8	Capaian Tujuan 7 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-53
Tabel 2.9	Capaian Tujuan 8 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-58
Tabel 2.10	Capaian Tujuan 9 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-66
Tabel 2.11	Capaian Tujuan 10 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-71
Tabel 2.12	Capaian Tujuan 11 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-78
Tabel 2.13	Capaian Tujuan 12 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-86
Tabel 2.14	Capaian Tujuan 13 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-92
Tabel 2.15	Capaian Tujuan 14 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-96
Tabel 2.16	Capaian Tujuan 15 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-101
Tabel 2.17	Capaian Tujuan 16 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-109
Tabel 2.18	Capaian Tujuan 17 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	II-119
Tabel 2.19	Kendala dan Tantangan Pelaksanaan TPB Tahun 2020 Berdasarkan Perangkat Daerah	II-126



Tabel 3.1	Jumlah Indikator TPB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026	III-7
Tabel 3.2	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	III-9
Tabel 3.3	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	III-18
Tabel 3.4	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	III-25
Tabel 3.5	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	III-34
Tabel 3.6	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 5 Kesetaraan Gender	III-43
Tabel 3.7	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	III-46
Tabel 3.8	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	III-49
Tabel 3.9	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	III-51
Tabel 3.10	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	III-58
Tabel 3.11	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	III-61
Tabel 3.12	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	III-69
Tabel 3.13	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	III-75
Tabel 3.14	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	III-78
Tabel 3.15	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 14 Ekosistem Lautan	III-83
Tabel 3.16	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 15 Ekosistem Daratan	III-86
Tabel 3.17	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	III-90
Tabel 3.18	Target dan Indikator Tingkat Dampak Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	III-96



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	4 Pilar TPB/SDGs	I-3
Gambar 1.2	Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-5
Gambar 1.3	Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs	I-6
Gambar 2.1	Persentase Capaian TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Utara	II-3
Gambar 2.2	Persentase Capaian Tujuan 1 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-4
Gambar 2.3	Persentase Capaian Tujuan 2 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-0
Gambar 2.4	Persentase Capaian Tujuan 3 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-16
Gambar 2.5	Persentase Capaian Tujuan 4 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-25
Gambar 2.6	Persentase Capaian Tujuan 5 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-34
Gambar 2.7	Persentase Capaian Tujuan 6 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-41
Gambar 2.8	Persentase Capaian Tujuan 7 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-48
Gambar 2.9	Persentase Capaian Tujuan 8 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-52
Gambar 2.10	Persentase Capaian Tujuan 9 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-59
Gambar 2.11	Persentase Capaian Tujuan 10 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-64
Gambar 2.12	Persentase Capaian Tujuan 11 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-71
Gambar 2.13	Persentase Capaian Tujuan 12 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-78
Gambar 2.14	Persentase Capaian Tujuan 13 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-83
Gambar 2.15	Persentase Capaian Tujuan 14 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-86
Gambar 2.16	Persentase Capaian Tujuan 15 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-90
Gambar 2.17	Persentase Capaian Tujuan 16 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-97
Gambar 2.18	Persentase Capaian Tujuan 17 TPB/SDGs Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	II-107



Gambar 4.1	Alur Informasi Untuk Pemantauan RAD TPB/ SDGs	IV-2
Gambar 4.2	Alur Informasi Pemantauan Organisasi NonPemerintah	IV-4



## BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN

### PELAKSANAAN TPB/SDGs

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama pada semua pemangku kepentingan atas setiap indikator guna penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota di Indonesia.

Pada bab ini disajikan kondisi pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs sampai dengan tahun 2020, melalui indikator-indikator TPB/SDGs. Kondisi pencapaian setiap TPB berdasarkan Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Utara pada 2021 menggunakan data capaian tahun 2020. Data capaian pada 2020 berasal dari OPD yang bertanggungjawab pada capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017. Berikut hasil evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021, berdasarkan data 2020.

**Tabel 2.1**

**Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Utara  
pada Tahun 2021**

Tujuan	Belum tersedia	Indikator Global	Tercapai	Perlu Perhatian	akan membaik	Tidak ada Target & Baseline	Jumlah Indikator
Tujuan 1	9	7	11	0	5	1	33
Tujuan 2	6	7	4	0	3	0	20
Tujuan 3	23	12	9	0	4	2	50
Tujuan 4	2	5	9	2	5	0	23
Tujuan 5	8	5	7	0	1	0	21
Tujuan 6	21	11	7	0	1	0	40
Tujuan 7	0	3	2	0	4	0	9
Tujuan 8	7	7	6	0	7	1	28
Tujuan 9	9	5	6	1	1	0	22
Tujuan 10	10	9	4	0	2	0	25
Tujuan 11	12	12	5	1	0	3	33
Tujuan 12	4	12	3	0	0	0	19



Tujuan	Belum tersedia	Indikator Global	Tercapai	Perlu Perhatian	akan membaik	Tidak ada Target & Baseline	Jumlah Indikator
Tujuan 13	3	4	0	0	0	1	8
Tujuan 14	7	6	1	0	1	0	15
Tujuan 15	10	12	3	0	0	0	25
Tujuan 16	25	18	6	0	2	1	52
Tujuan 17	29	18	3	0	0	0	50
Total	185	153	84	4	37	9	473

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Utara, ada 86 Indikator yang berstatus Tercapai, 36 Indikator berstatus Akan Membaik, 9 Indikator berstatus Belum Ada Target, 185 Indikator berstatus Belum Tersedia, dan 153 merupakan Indikator Global. Jika dilihat dari hasil tersebut, indikator yang paling mendominasi ialah indikator dengan status Belum tersedia, yaitu ada 185 Indikator, hal itu dikarenakan:

- Ada beberapa indikator yang data capaiannya bergantung di BPS, dan BPS tidak dapat mengeluarkan data capaian tersebut tiap tahun (tidak *TimeSeries*);
- Data yang bergantung di BPS sudah tidak dapat di update pada tahun 2020 karena Laporan Tahunan 2020 masih berpedoman pada RAD SDGs 2018-2021 yang metadatanya masih menggunakan Metadata Edisi I, sedangkan BPS sudah menggunakan Metadata Edisi II;
- Ada beberapa data menggunakan Tahun 2019 karena data Tahun 2020 belum tersedia;
- Ada beberapa OPD yang belum sempat menyampaikan data capaian TPB/SDGs ke sekretariat SDGs di Bappeda & Litbang; dan
- Ada beberapa Indikator tidak ada data/tidak dapat di implementasikan di Provinsi Kalimantan Utara.



**Gambar 2.1**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

### 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 33 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Dari 33 indikator tersebut diantaranya ialah:

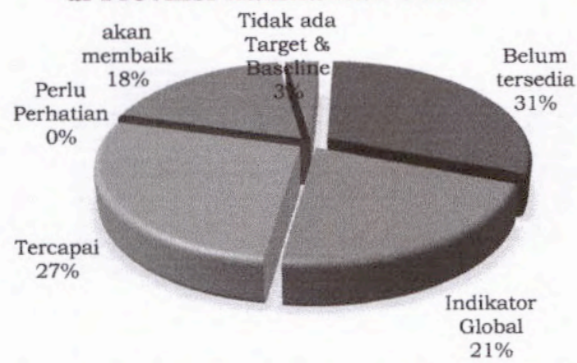
1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 11 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 5 Indikator
3. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 9 Indikator
4. Indikator **sudah terlaksana tetapi tidak ada Target & Baseline** sebanyak 1 Indikator
5. Indikator **Global** sebanyak 7 Indikator.

Pada indikator 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN masih menggunakan data Tahun 2019 (sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target), dikarenakan Tahun 2020 belum tersedia.

Jika dipersentasikan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 1 di Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Persentase Capaian Tujuan 1 TPB/SDGs Tahun 2020**  
**di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 1 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.



**Tabel 2.2**

**Capaian Tujuan 1 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan</b>							
<b>1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua oryag saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.						Indikator Global
<b>Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas, BPS, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	%	7,22	1,6	7,41	
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						Indikator Global
<b>Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.						Indikator Global
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPS, BPJS, Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-	-	-	Belum Tersedia



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan							
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS, Ketenagakerjaan, Taspen, ASABRI; Sakernas BPS	Formal (%) Informal (%)	-	-	-	Belum Tersedia
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	%	4	PM	-	Belum Tersedia
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	Jiwa	8511	PM	13915	
<b>Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.						Indikator Global
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	78%	PM	85,91	
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	56%	PM	45,33	
1.4.1 c	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	BKKBN Perwakilan Kalimantan Utara	%	67%	PM	67%	



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan							
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	DPUPR-PERKIM	(% & Jiwa)	63,06% (156.369 Jiwa)	PM	82,35	●
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	DPUPR-PERKIM	(% & Jiwa)	45,85% (115.147 Jiwa)	PM	71,13	●
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	DPUPR-PERKIM	%	93,07	PM	14,19%	●
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	88,48	96,98	93,46	▶
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	68,02	81,52	79,09	▶
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	56,52	81,14	64,75	▶
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara	%	82,81	89	87,47	▶
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara	%	94,59	PM	99,68 (2019)	●



Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan							
1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yangmendapatkan hak atas tanah yangdidasari oleh dokumen hukum dan yangmemiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.						Indikator Global
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara, DIBI	PM	BNPB	PM	18	
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	Lokasi	5	PM	5 Desa Tangguh Bencana	
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan BPBD Provinsi Kalimantan Utara dan SATPOL-PP	Jiwa	-	-	-	Belum Tersedia
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	Jiwa	-	-	-	Belum Tersedia
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltara	Daerah	-	-	-	Belum Tersedia
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	Indeks resiko	-	-	-	Belum Tersedia



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan							
1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.						Indikator Global
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	Rupiah	-	PM	1.208.400.000	Tidak ada Target & Baseline
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	Dokumen	-	-	-	Belum Tersedia
<b>Target 1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan disemua dimensi.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.		Rupiah	-	-	-	Belum Tersedia
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.		Miliar Rupiah, Fungsi Pendidikan	-	-	-	Belum Tersedia
			Miliar Rupiah, Fungsi Kesehatan	-	-	-	Belum Tersedia
			Miliar Rupiah, Fungsi Perlindungan Sosial	-	-	-	Belum Tersedia
<b>1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
1.b.1*	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.						Indikator Global

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



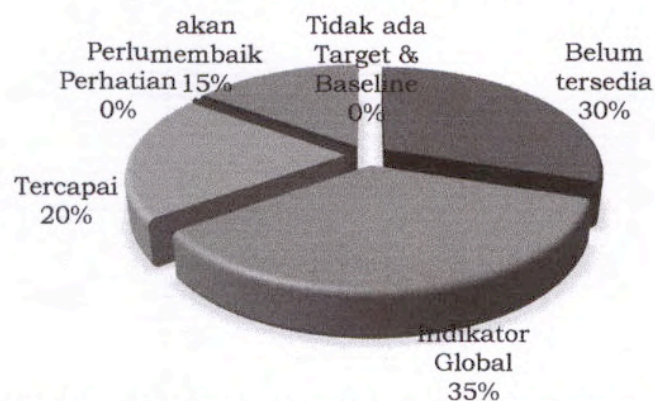
## 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 20 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Dari 20 indikator tersebut diantaranya ialah:

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 4 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 3 Indikator
3. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 6 Indikator
4. Indikator **Global** sebanyak 7 Indikator.

Jika dipersentasekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 2 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 2 di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 2 di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020:



**Tabel 2.3**

**Capaian Tujuan 2 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 2 Tanpa Kelaparan</b>							
<b>Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Susenas, BPS	%	14,42	-	-	Belum Tersedia
2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	%	2,40 (Gizi Buruk)	PM	2,40 (Gizi Buruk)	
				14,4 (Gizi Kurang)		14,4 (Gizi Kurang)	
				16,80 (Kekurangan Gizi)		16,80 (Kekurangan Gizi)	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Susenas BPS	%	-	-	-	Belum Tersedia
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	18,2	PM	12,89	
<b>Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	%	22,10 (pendek);	PM	20,1 (Pendek)	
				11,30 (sangat pendek)		6,8 (Sangat Pendek)	
2.2.1(a)		Dinas Kesehatan	%	15,40 (pendek);	PM	22,1 (Pendek)	



Tujuan 2 Tanpa Kelaparan							
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta			10,90 (sangat pendek)		8,7 (Sangat Pendek)	
2.2.2	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	%	5,2	PM	7,6	
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-	-	-	Belum Tersedia
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	66,04	PM	76,97	
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Pertanian	Skor kg/kapita/Tahun	80,7	85,8	85,8	
<b>Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian BPS	Rupiah/ Tenaga kerja	147.300.835	Belum ada perhitungan		Belum Tersedia
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.						Indikator Global
<b>2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</b>							



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

<b>Tujuan 2 Tanpa Kelaparan</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.						Indikator Global
<b>Target 2.5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	VUB Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai) Kumulatif VUB Hewan untuk Pangan (ayam lokal petelur, ayam pedaging, itik unggul, dan ternak domba komposit Sumatera)	-	-	-	Belum Tersedia
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Hewan Ternak	-	-	-	Belum Tersedia
<b>2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
2.a.1	Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian.						Indikator Global
2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.						Indikator Global
<b>2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.</b>							



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

<b>Tujuan 2 Tanpa Kelaparan</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
2.b.1	Perkiraan dukungan kebijakan kepadaprodusen.						Indikator Global
2.b.2	Subsidi ekspor pertanian.						Indikator Global
<b>2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
2.c.1	Indikator anomali harga pangan.						Indikator Global

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



### **2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**

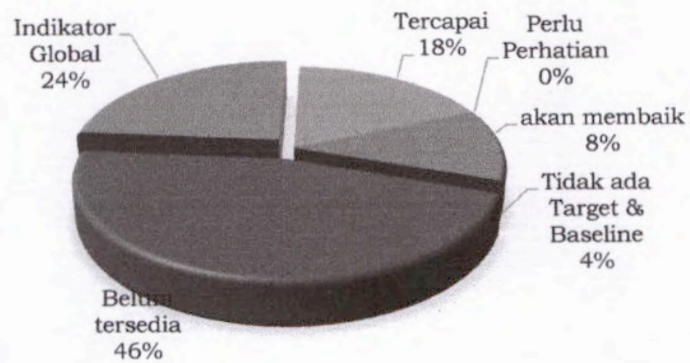
Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Dari 50 indikator tersebut diantaranya ialah:

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 9 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 4 Indikator
3. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 23 Indikator
4. Indikator **sudah terlaksana tetapi tidak ada Target & Baseline** sebanyak 2 Indikator
5. Indikator **Global** sebanyak 12 Indikator.

Jika dipersentasekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 3 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.4**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 3 di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 3 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.4**

**Capaian Tujuan 3 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</b>							
<b>TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	kematian per 100.000 kelahiran hidup	172,92 (2016)	-	-	Belum Tersedia
3.1.2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Susenas BPS	%	95,11	PM	97,48	
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS	%	81,76	PM	90,25	
<b>Tujuan SDGs : TARGET 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh Negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	kematian per 1000 kelahiran hidup	3,70 (2016)			Belum Tersedia
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	kematian per 1000 kelahiran hidup	-			Belum Tersedia
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	kematian per 1000 kelahiran hidup	10,46 (2016)			Belum Tersedia
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-		40	Tidak Ada Target
<b>Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.						Indikator Global



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-			Belum Tersedia
3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang						Indikator Global
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	18,66 (2016)			Belum Tersedia
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	0,09	PM	0,08	
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Kab/Kota	1	PM	1	
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.						Indikator Global
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Kab/Kota	2	PM	2	
3.3.5*	Jumlah orang yg memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Juta Orang (Filariasis) Orang (Kusta)	-			Belum Tersedia
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara		Sudah			Belum Tersedia
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten/ Kota	0		0	Belum Tersedia
<b>Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.						Indikator Global



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-			Belum Tersedia
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-			Belum Tersedia
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-			Belum Tersedia
3.4.2*	Angka kematian ( <i>insidens rate</i> ) akibat bunuh diri.		kematian per 100.000 Penduduk	-			Belum Tersedia
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten / Kota	5	5	5	
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.						Indikator Global
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	orang	-			Belum Tersedia
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	orang	-			Belum Tersedia
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	orang	-			Belum Tersedia
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	orang	-			Belum Tersedia



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-			Belum Tersedia
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	liter per kapita	-			Belum Tersedia
<b>Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-	PM	46,9	Tidak Ada Target
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	52,8	PM	52,8	
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	8,5	PM	8,5	
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Kelahiran per 1000 perempuan 15- 19 tahun	33			Belum Tersedia
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	2,8	PM	2,8	
<b>Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).						Indikator Global
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	7,55	PM	3,76	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Juta Penduduk	514366	PM	4741542	
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-			Belum Tersedia
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
3.9.1	Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien.						Indikator Global
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.						Indikator Global
3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.						Indikator Global
3.9.3(a)	Proporsi Kematian Akibat Keracunan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara		-			Belum Tersedia
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)



Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	28,18	PM	24,52	
<b>Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan.						Indikator Global
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	-			Belum Tersedia
3.b.1.(a)	Total Official Development Assisstant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.						Indikator Global
<b>Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.						
	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Dokter spesialis per 1.000 penduduk	10,5 (2016)			Belum Tersedia
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	dokter umum per 1.000 penduduk	31,49 (2016)	PM	33	Tidak Ada Target
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	dokter gigi per 1.000 penduduk	14,99 (2016)	PM	6	Tidak Ada Target
	Kepadatan dan distribusi perawat	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	perawat per 1.000 penduduk	235 (2016)	PM	238	Tidak Ada Target



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	perawat gigi per 1.000 penduduk	-			Tidak Ada Target
	Kepadatan dan distribusi bidan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	bidan per 1.000 penduduk	104 (2016)	PM	137	Tidak Ada Target
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	tenaga gizi per 1.000 penduduk	14 (2016)	PM	14	Tidak Ada Target
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	tenaga kesehatan lingkungan per 1.000 penduduk	-	PM	11	Tidak Ada Target
	Kepadatan dan distribusi tenaga keterampilan fisik	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	tenaga keterampilan fisik per 1.000 penduduk	-			Belum Tersedia
	Kepadatan dan distribusi tenaga keteknisan medis	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	tenaga keteknisan medis per 1.000 penduduk	-			Belum Tersedia
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	tenaga kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	27 (2016)	PM	26	Tidak Ada Target
<b>3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan						Indikator Global

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



#### **2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Dimensi pendidikan menjadi focus dan perhatian bersama untuk terus diupayakan ditingkatkan kualitasnya oleh Pemerintah Provinsi Kaltara bersama seluruh stakeholder baik daerah maupun pemerintah pusat, agar kedepannya pembangunan didaerah ini bisa beralih dari eksploitasi sumberdaya alam primer ke multi keberlanjutan pembangunan terutama dengan mengedepankan peningkatan sumberdaya manusia.

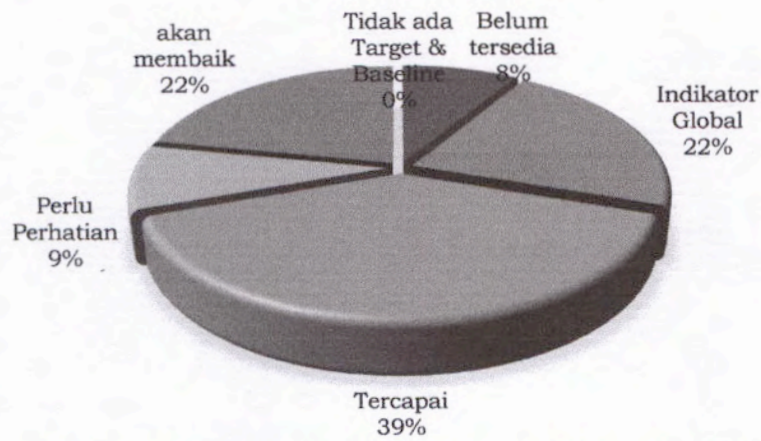
Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 4 ini sangat bagus, dari 23 indikator diatas 9 indikator telah tercapai, berikut penjelasan indikiator lainnya:

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 9 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 5 Indikator
3. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus Perlu Perhatian** sebanyak 2 Indikator
4. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 2 Indikator
5. Indikator **Global** sebanyak 5 Indikator.

Jika dipresentsaekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 4 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.5**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 4 di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 4 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.5**

**Capaian Tujuan 4 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas</b>							
<b>4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	60	88		Belum Tersedia
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	49	83		Belum Tersedia
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	98,27	98,62		Belum Tersedia
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	98.27	98,62		Belum Tersedia
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	98.27	98,62		Belum Tersedia
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	98.27	98,62		Belum Tersedia
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	36,5	65,5	40,22	



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas							
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	37,4	65,25	33,51	▼
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	50,8	61	60,19	▶
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Susenas BPS	%	103,86	PM	101,7	▶
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Susenas BPS	%	98,12	PM	98,25	●
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Susenas BPS	%	87,68	PM	97,91	●
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS	Tahun	9,1	PM	9,24	●
<b>Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.						Indikator Global
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia Sekolah dasar), menurut jenis kelamin.						Indikator Global
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Susenas BPS	%	30,02	PM	30,15	●



<b>Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas</b>							
<b>Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.						Indikator Global
4.3.1(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	80,8	89	96,76	
4.3.1(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	26,76	29,75	22,71	
<b>Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas BPS	% remaja (15-24)	72,13	PM	87,29	
		Susenas BPS	% dewasa (15-59)	45,68	PM	65,36	
<b>Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.						
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat	Susenas BPS	%	101,95	PM	95,8	



Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas							
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	Susenas BPS	%	98,44	PM	106,09	
	Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat	Susenas BPS	%	101,24	PM	107,22	
	Rasio APK Perempuan/laki-laki di PT	Susenas BPS	%	80,8	PM	140,52	
<b>Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
4.6.1.(a)	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.						Indikator Global
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Susenas BPS	% (umur 15- 24 tahun)	95,14	PM	96,39	
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Susenas BPS	% (15-24 tahun)	99,42	PM	99,68	
			% (umur 15- 59 tahun)	97,39	PM	98,19	
<b>4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)



Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas							
4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.						Indikator Global
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	-	96	93,36	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	-	75	79,25	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	-	65	79,25	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	-	75	-	Belum tersedia
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					



Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas							
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	-	85	-	Belum tersedia
	Proporsi sekolah dengan akses ke:(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	-	75	-	Belum tersedia
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	-	70	-	Belum tersedia
<b>Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mahasiswa	-	-	-	Belum tersedia
<b>Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
4.c.1*	Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	-	45	30,95	
	Jumlah guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Orang	-	140	200	
	Jumlah guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Orang	-	1600	1828	



Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas							
Jumlah guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Orang	-	700	816		
Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Orang	378	550	461	▶	
Jumlah guru SMK yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Orang	287	515	344	▶	
Persentase guru Dikmas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	81,88	87,5		▶	
Jumlah guru TK/TKLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Orang	268	695	726		
Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	81,88	87,5	87		
Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	70,7	78	80,4		
Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	93	97	93,6		
Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	96	99,5	98,3		
Persentase guru SMA dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	95,55	99,5	99,2		
Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	96,51	99,5	97,4		

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## 2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

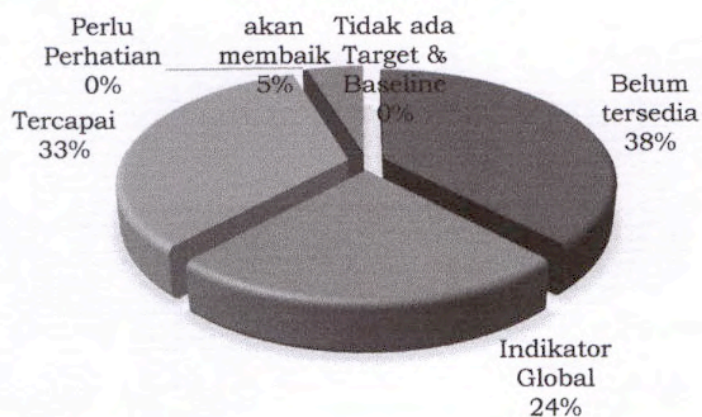
Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 5, dari 21 indikator diatas diantaranya ialah:

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 7 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 1 Indikator
3. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 8 Indikator
4. Indikator **Global** sebanyak 5 Indikator.

Jika dipresentsaekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 5 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.6**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 5 di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 5 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.6**

**Capaian Tujuan 5 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</b>							
<b>Target 5.1 Mengakhiri Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan dimanapun</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
5.1.1	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara	Perda/Pergub	0	3	3	
<b>Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	-	-		Belum Tersedia
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	-	-		Belum Tersedia
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan	%	-	-		Belum Tersedia



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	-	-		Belum Tersedia
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Susenas BPS	% (sebelum umur 15 tahun)	2,83	PM	12,94	
			% (sebelum umur 18 tahun)	16,57			
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tahun	21,9	PM	21,9	
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun	33	-	-	Belum Tersedia
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Susenas BPS	%	87,68	PM	97,91	



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.						Indikator Global
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.						Indikator Global
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	KPU; Sekretariat, DPD; BKN	%	DPRD Prov=35 orang DPRD Kab. Bulungan = 25 orang DPRD Kota Tarakan = 30 orang DPRD Kab. Nunukan = 30 orang DPRD Kab. Malinau = 30 orang DPRD Kab. Tana Tidung = 20 orang	-	-	Belum Tersedia
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKN; Sakernas BPS	orang	Prov. Esselon 1= 0 orang	-		Belum Tersedia
			orang	Prov. Esselon 2= 1 orang	-		
			orang	Kab Bulungan Esselon 1= 0 orang	-		



Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
			orang	Kab Bulungan Eselon 2= 1 orang	-		
			orang	Kota Tarakan Eselon 1= 0 orang	-		
			orang	Kota Tarakan Eselon 2= 1 orang	-		
			orang	Kab. Nunukan Eselon 1= 0 orang	-		
			orang	Kab Nunukan Eselon 2= 1 orang	-		
			orang	Kab Malinau. Eselon 1= 0 orang	-		
			orang	Kab Malinau Eselon 2= 1 orang	-		
			orang	Kab Tana Tidung. Eselon 1= 0 orang	-		
			orang	Kab Tana Tidung Eselon 2= 1 orang	-		
Target 5.6 Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi, dan Hak Reproduksi Seperti Yang Telah Disepakati Dengan Programme Of Action Of The International Conference On Population and Development and The Beijing Platform Serta Fokumen-dokumen Hasil Review Dari Konferensi-konferensi Tersebut							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
5.6.1	Proporsi Perempuan Umur 15-49 Tahun Yang Membuat Keputusan Sendiri Terkait Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, dan Layanan Kesehatan Reproduksi	BPS Provinsi Kalimantan Utara	%	-	-		Belum Tersedia



Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.6.1 a	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	BKKBN Perwakilan Kalimantan Utara	%	20,90%	8,33%	21,20%	
5.6.1 b	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BPS Provinsi Kalimantan Utara	%	-	15	78,72	
5.6.2	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Perda/Pergub	0	1	1	
<b>5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
5.a.1	(1)Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.						Indikator Global
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.						Indikator Global
<b>Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Diskominfo	%	68,62	PM	74,32%	
<b>5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.</b>							



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan						Indikator Global

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

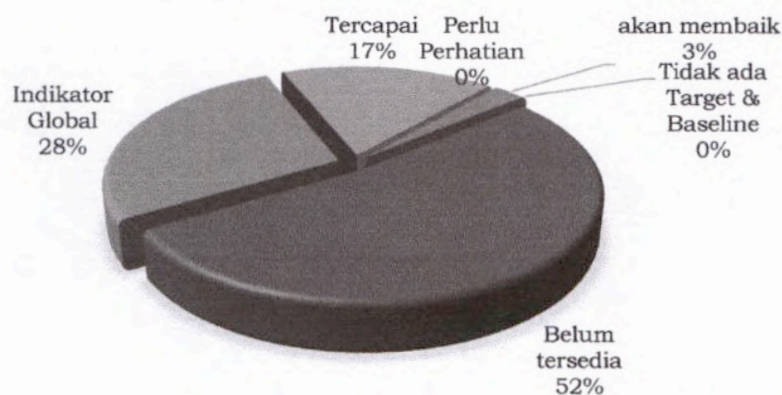
Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air.

Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 6, dari 40 indikator diatas diantaranya ialah:

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 7 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 1 Indikator
3. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 21 Indikator
4. Indikator **Global** sebanyak 11 Indikator.

Jika dipersentasekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 6 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.7**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 6 di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 6 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.7**

**Capaian Tujuan 6 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</b>							
<b>Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman					Indikator Global	
6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	DPUPR-PERKIM	%	63,06%	PM	87,9	
6.1.1(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	DPUPR-PERKIM	liter/detik	785 liter/detik	PM	742,5 Liter/Detik	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	DPUPR-PERKIM	%	63,06%			Belum Tersedia
<b>TARGET 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.						Indikator Global
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	87,81			Belum tersedia
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	%	66,06	PM	77,2	



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak							
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	desa/kelurahan	-	-		Belum Tersedia
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)</i> .	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	desa/kelurahan	-	-		Belum Tersedia
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	DPUPR-PERKIM	Kabupaten/Kota (Skala Kota)	0	PM	1	
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	DPUPR-PERKIM	%	-	-	-	Belum Tersedia
<b>Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman						Indikator Global
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DPUPR-PERKIM	Kabupaten/Kota	0	PM	1	
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DPUPR-PERKIM	%	-	-	-	Belum Tersedia
6.3.1	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.						Indikator Global
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	DLH Provinsi Kalimantan Utara	Danau Prioritas	-	-		Belum Tersedia
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	DLH	Titik pantau	2			Belum Tersedia



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak							
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.						Indikator Global
6.4.1 (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	Belum tersedia
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	-	-	-	-	-	Belum tersedia
6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.						Indikator Global
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).						Indikator Global
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DLH Provinsi Kalimantan Utara	RPDAST	-	-	-	Belum Tersedia
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	DPUPR-PERKIM	Unit	0	1	6	
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DLH Provinsi Kalimantan Utara	Wilayah Sungai	-	-	-	Belum Tersedia
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Dinas Kehutanan	DAS Lintas	-	-	-	Belum Tersedia



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak							
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Kehutanan	Ha	5	-		Belum Tersedia
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Kehutanan	Wilayah Sungai	5	-		Belum Tersedia
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	DPUPR-PERKIM	Lembaga	0	6	6	
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Kehutanan	DAS	0	-		Belum Tersedia
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Kehutanan	DAS	1			Belum Tersedia
6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional.						Indikator Global
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.						Indikator Global
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	-	-	-	-	-	Belum Tersedia
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	DLH Provinsi Kalimantan Utara	Danau	-	-	-	Belum Tersedia
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	DLH Provinsi Kalimantan Utara	Danau	-	-	-	Belum Tersedia



Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak							
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Kehutanan dan DLH	Ha	1655	PM	7254	
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Kehutanan	DAS Prioritas	1	-	-	Belum tersedia
6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.						Indikator Global
6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan dan sanitasi							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.						Indikator Global

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## **2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern**

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

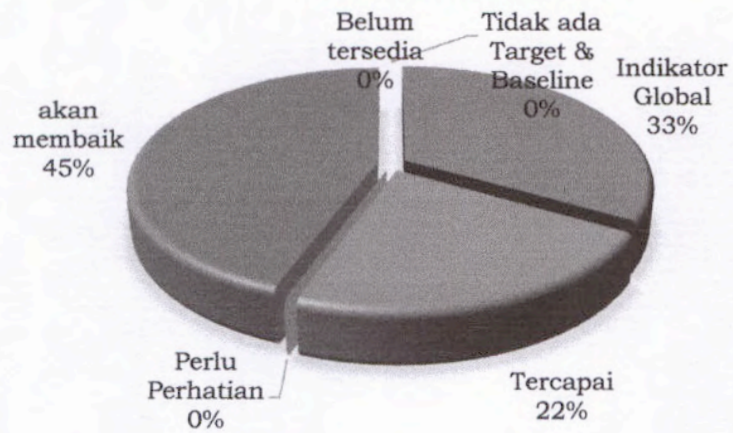
Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 7, dari 9 indikator diatas diantaranya ialah:

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 2 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 4 Indikator
3. Indikator **Global** sebanyak 3 Indikator.

Berdasarkan data diatas, pada indikator 7.3.1 intensitas Energi Primer masih menggunakan data Tahun 2018 (sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target), dikarenakan Tahun 2020 belum tersedia. Jika dipresentsaekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 7 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.8**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 7 di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 7 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.8**

**Capaian Tujuan 7 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 7 MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA</b>							
<b>7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energy yang terjangkau, andal dan modern</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
7.1.1	Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM	%	91,16 (nasional)	PM	78,96	
7.1.1.(a)	Konsumsi Listrik per Kapita	Dinas ESDM	kWh	956	PM	992,53	
7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.						Indikator Global
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*	Dinas ESDM	SR	88915 (nasional)	PM	13079	
7.1.2. (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Dinas ESDM		68,2	PM	78,57	
<b>Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Dinas ESDM	%	7	PM	0,011	
<b>Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
7.3.1	Intensitas Energi Primer	Dinas ESDM	SBM	440,3	PM	46,32 (2018)	



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 7 MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA							
<b>Target 7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
7.a.1	Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar.						Indikator Global
<b>7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara - negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.						Indikator Global

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## **2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Pada jangka waktu 5 tahun terakhir ini, PDB per kapita di Indonesia naik setiap tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhannya. Sektor pariwisata, khususnya di Indonesia, memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pariwisata perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja. Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Tujuan 8 ini terdiri dari 12 Target dan 28 Indikator.

Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 8, dari 28 indikator diatas diantaranya ialah,

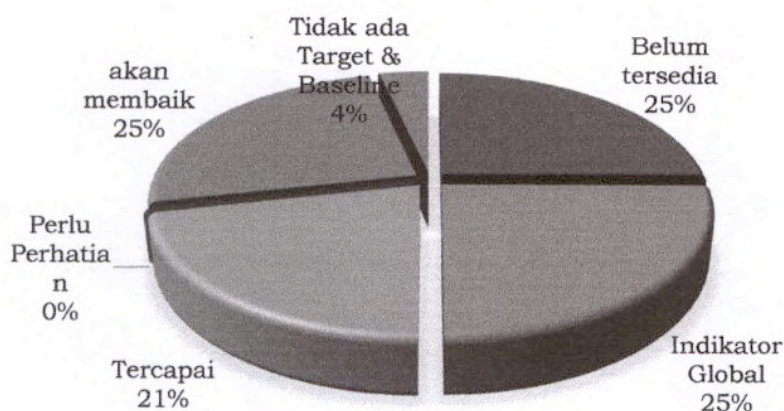


1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 6 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 7 Indikator
3. Indikator **sudah dilaksanakan dan Tidak ada Target & Baseline** sebanyak 1 Indikator
4. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 7 Indikator
5. Indikator **Global** sebanyak 7 Indikator.

Dari indikator yang berstatus tidak tersedia data, pada Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara, tersedia data tetapi beda satuan dengan satuan di metadata, data yang ada dalam satuan persentase, sedangkan data yang di Indikator ialah Juta Orang.

Jika dipresentsaekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 8 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.9**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 8 di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 8 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.9**

**Capaian Tujuan 8 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua</b>							
<b>Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	2,97	PM	3,19	
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Juta	111,32	PM	131302,2	
<b>Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Disnakertrans	%	-	PM	3,59	Tidak ada Target & Baseline
<b>Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Disnakertrans	Orang	7.995	16.224	13.556	
8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal.	Disnakertrans	%	54	63	49	
8.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Disnakertrans	%	2	5	3	



Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua							
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Bank Indonesia (SSKI); BPSKemen KUKM	%	-			Belum Tersedia
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.						Indikator Global
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).						Indikator Global
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Disnakertrans	Rp	20.177	16.696	17.346	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Disnakertrans	%	5,54	4	5	
8.5.2 (a)	Persentase setengah pengangguran.	Disnakertrans	Orang	7,24	28	39	
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Disnakertrans	%	16,35	PM	21,04	
Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.							



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

<b>Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.7.1*	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).						Indikator Global
<b>Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.						Indikator Global
8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Disnakertrans	Perusahaan	901	PM	162	
		Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara	Perusahaan	47	47	76	
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.						Indikator Global
<b>Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara	%	1,58	1,62	1,54	



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua							
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS (Statistik Pariwisata) & Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara	Juta orang	0,26749	0,276933	0,397908	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS (Statistik Pariwisata) & Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara	Juta orang	728 373	-	-	Belum Tersedia
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	BPS (Statistik Pariwisata) dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara	Triliun Rupiah (Kurs Rp12.000)	-	-	-	Belum Tersedia
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	BPS (Nesparnas)	%	1,79	1,8	1,81	
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.10.1*	b. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	Unit	-	-		Belum Tersedia
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS (Podes)	Km	-	-		Belum Tersedia
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Disperindagkop & UKM	%	20,12a			Belum Tersedia
8.10.2	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.			-	-		Belum Tersedia
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua							
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.						Indikator Global
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.						Indikator Global

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## **2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi**

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Tujuan 9 ini terdiri dari 8 Target dan 22 Indikator, meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

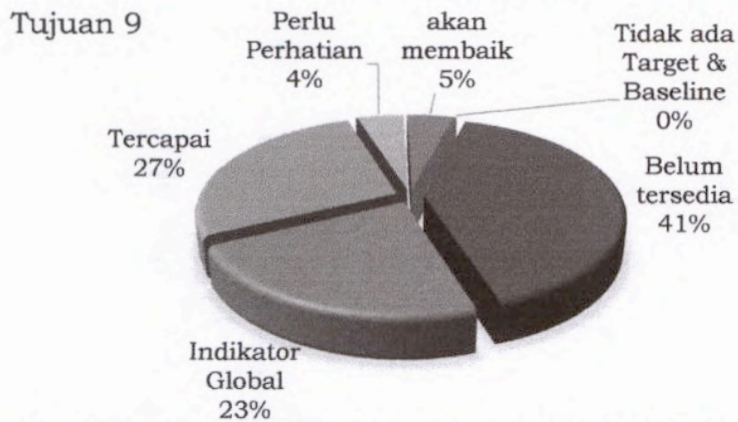
Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 9, dari 22 indikator diatas diantaranya ialah:

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 6 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 1 Indikator
3. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus Perlu Perhatian** sebanyak 1 Indikator
4. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 9 Indikator
5. Indikator **Global** sebanyak 5 Indikator.

Berdasarkan data diatas, pada indikator 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet masih menggunakan data Tahun 2019 (sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target), dikarenakan Tahun 2020 belum tersedia. Jika dipresentsaekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 9 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.10**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 9 di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 9 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.10**  
**Capaian Tujuan 9 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 9 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI.</b>							
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.						Indikator Global
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Provinsi	DPUPR-PERKIM	%	79,892%	94,85%	15%	▼
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	DUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara	km	-	-	-	Belum Tersedia
9.1.1 (c)	Panjang jalur kereta api	DUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara	km	-	-	-	Belum Tersedia
9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.						Indikator Global
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	unit	15	15	15	●
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	Unit	4	4	4	●
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	lokasi	2	2	2	●
<b>Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Renstra Kemenperin 2015-2019	%	-	-		Belum Tersedia



Tujuan 9 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI.							
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	1. RKP 2015- 2019 2. Renstra Kemenperin 2015- 2019	%	-	-		Belum Tersedia
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	1. RKP 2015- 2019 2. Renstra Kemenperin 2015- 2020	%	-	-		Belum Tersedia
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Disperindag Provinsi Kalimantan Utara	%	9,5	9,8	10,33	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Disperindag Provinsi Kalimantan Utara	Rp (Juta)	3200	3500	3103	
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
9.4.1*	Rasio Emisi CO2 /Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	DLH	Kab/Kota	5 Kab/Kota	-		Belum Tersedia
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara; dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	%	-	-		Belum Tersedia
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara -negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 9 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI.							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB						Belum Tersedia
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.						Indikator Global
<b>9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.						Indikator Global
<b>9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.						Indikator Global
<b>Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	BPS & Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara	%	-	-		Belum Tersedia
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas Kor BPS	%	68,62	PM	74,32 (2019)	
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS & Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara	%	36,4	PM	60,52	

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## 2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari 10 target dan 25 indikator. Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab.

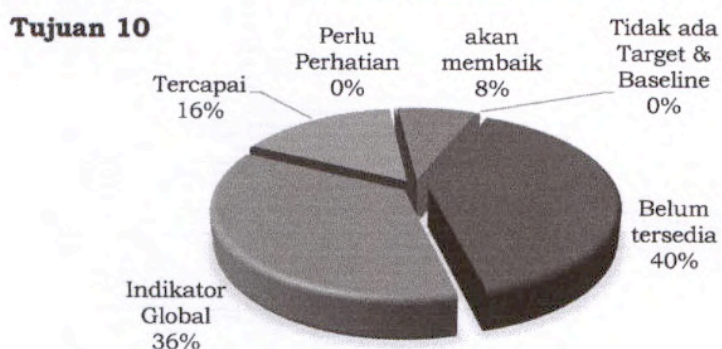
Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 10, dari 25 indikator diatas diantaranya ialah,

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 4 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 2 Indikator
3. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 10 Indikator
4. Indikator **Global** sebanyak 9 Indikator.

Berdasarkan data diatas, pada indikator 10.1.1\* Koefisien Gini (sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik), dan 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target), masih menggunakan data Tahun 2019, dikarenakan Tahun 2020 belum tersedia. Jika dipresentsaekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 10 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.11**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 10 di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 10 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.11**

**Capaian Tujuan 10 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan</b>							
<b>Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	Indeks	0,308	PM	0,292 (2019)	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	7,22	PM	6,8	
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara; dan DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten	1		0	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara; dan DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Desa	117	210	208	
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara; dan DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Desa	0	22	19	
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara;	%	-	-		Belum Tersedia



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan							
		dan DPMD Provinsi Kalimantan Utara					
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara; dan DPMD Provinsi Kalimantan Utara	%	-	-		Belum Tersedia
<b>Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Susenas	%	-	-		Belum Tersedia
<b>Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.						Indikator Global
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Kementerian Polhukam dan BPS	indeks	81,05	PM	96,9 (2019)	
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).		Berkas Pengaduan	-	-		Belum Tersedia



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan							
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komnas Perempuan	%	-	-		Belum Tersedia
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perempuan	Kebijakan/Dokumen	-	-		Belum Tersedia
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.						Indikator Global
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Dinas Sosial	%		-		Belum Tersedia
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan,	%	-	-		Belum Tersedia
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
10.5.1	Financial Soundness Indicator.						Indikator Global
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.						Indikator Global
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik							



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.						Indikator Global
10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.						Indikator Global
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.		Penambahan dokumen	-	-		Belum Tersedia
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.		-	-	-		Belum Tersedia
<b>10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari Negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen						Indikator Global
<b>10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negaranegara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)						Indikator Global



Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan							
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.						Indikator Global

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



### 2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 33 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan.

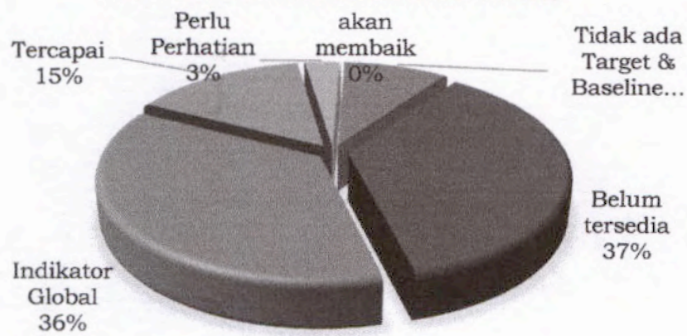
Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 11, dari 33 indikator diatas diantaranya ialah,

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 5 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus Perlu Perhatian** sebanyak 1 Indikator
3. Indikator **sudah dilaksanakan dan Tidak ada Target & Baseline** sebanyak 3 Indikator
4. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 12 Indikator
5. Indikator **Global** sebanyak 12 Indikator.

Berdasarkan data diatas, pada indikator 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (sudah dilaksanakan dan berstatus perlu perhatian) masih menggunakan data Tahun 2019, dikarenakan Tahun 2020 belum tersedia. Jika dipersentasikan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 11 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.12**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 11**  
**di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 11 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.12**

**Capaian Tujuan 11 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan</b>							
<b>Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.						Indikator Global
11.1.1.(a).	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara	% (metadata) unit (data tersedia)	97,57	PM	60,76 (2019)	▼
11.1.1.(b).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Kawasan	-	-	-	Belum Tersedia
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Kota Sedang	-	-	-	Belum Tersedia
<b>Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis						Indikator Global



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan							
	kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.						
11.2.1.(a).	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar		-	-	-	-	Belum Tersedia
11.2.1.(b).	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	%	-	-	-	Belum Tersedia
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua Negara							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.						Indikator Global
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama	DPUPR-PERKIM	Kota Sedang	-	-	-	Belum Tersedia
11.3.1.(b).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	DUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara	Metropolitan baru	-	-		Belum Tersedia
11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.						Indikator Global
11.3.2.(a).	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Kementerian PPN/Bappenas	PM	-	-		Belum Tersedia
11.3.2.(b).	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Kementerian Keuangan	PM	-	-		Belum Tersedia
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan							
11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).						Indikator Global
11.4.1.(a).	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	DUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara	Kota Pusaka	-	-		Belum Tersedia
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	orang		-	-	Belum Tersedia
11.5.1.(a).	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	indeks	BNPB	PM	0,28	Tidak ada Target & Baseline
11.5.1.(b).	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tangguh	2	PM	2	
11.5.1.(c).	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	Sistem	Kemendes PDT	PM	1	Tidak ada Target & Baseline
11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.						Indikator Global



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan							
1.5.2.(a).	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	Rp	-	-	-	Belum Tersedia
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota. gangguan terhadap pelayanan dasar.						Indikator Global
11.6.1.(a).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	%	52,1	PM	71%	
11.6.1.(b).	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Kota hijau	-	-		Belum Tersedia
11.6.1	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk).						Belum Tersedia
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.						Indikator Global
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	DPUPR-PERKIM	Kawasan Perkotaan Metropolitan/ Kota Sedang	5	1	1	



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan							
11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).						Indikator Global
11.7.2 a	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara	%	100,00%	75%	100%	
<b>11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.						Indikator Global
<b>Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimple-mentasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	%	Belum ada	-	-	Belum Tersedia
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	Dokumen	perda no 5 th 2019 tentang penanggulangan bencana	-	1	
<b>11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang						Indikator Global



Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan							
	berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.						

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## 2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

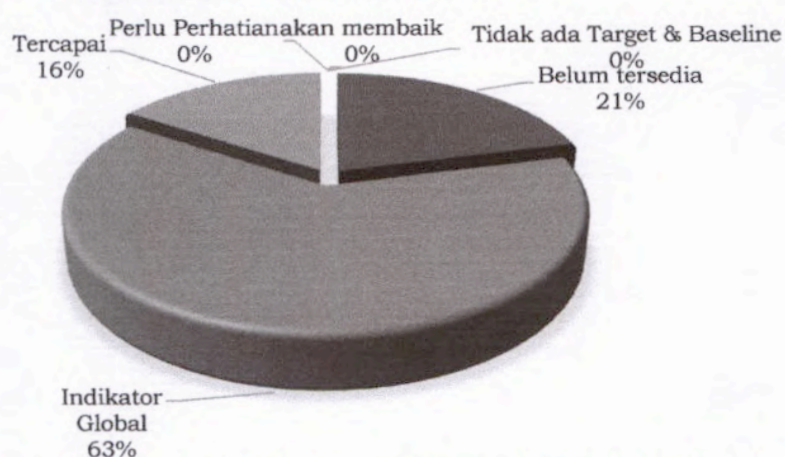
Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan.

Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 12, dari 19 indikator diatas diantaranya ialah,

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 3 Indikator
2. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 4 Indikator
3. Indikator **Global** sebanyak 12 Indikator.

Jika dipersentasekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 12 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.13**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 12**  
**di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 12 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.13**

**Capaian Tujuan 12 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 12 MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN</b>							
<b>Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins program</i> .	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Kolaborasi tematik	-	-		Belum tersedia
<b>12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.2.1	Jejak material (material footprint).						Indikator Global
12.2.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).						Indikator Global
<b>12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.						Indikator Global
<b>12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.						Indikator Global



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 12 MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
12.4.1. a	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	DLH	Kegiatan/Usaha	25 (2017)	PM	25	
12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.						Indikator Global
12.4.2. a	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Ton	553,1462	PM	2159,74 Ton	
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.						Indikator Global
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Ton	605,66	PM	79760,52 Ton	
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.						Indikator Global
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Perusahaan	-			Belum tersedia
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.						Indikator Global



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 12 MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Produk Ramah Lingkungan	-			Belum tersedia
<b>Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.						Indikator Global
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Fasilitas Publik	-			Belum tersedia
<b>12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.a.1	Jumlah dukungan negaranegara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.						Indikator Global
<b>12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.						Indikator Global
<b>12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak</b>							



<b>Tujuan 12 MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN</b>							
<b>lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.						Indikator Global

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



### 2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

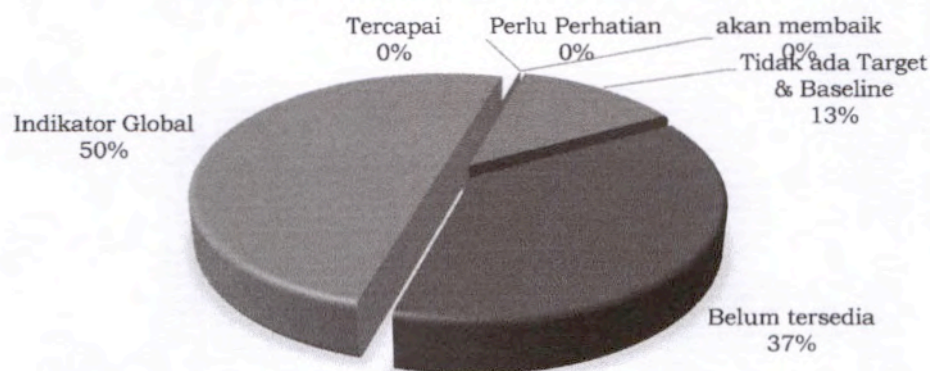
Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 13, dari 8 indikator diatas diantaranya ialah,

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan Tidak ada Target & Baseline** sebanyak 1 Indikator
2. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 3 Indikator
3. Indikator **Global** sebanyak 4 Indikator.

Jika dipersentasekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 13 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.14**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tujuan 13**  
**di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 13 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.14**

**Capaian Tujuan 13 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 13 MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA.</b>							
<b>Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	Dokumen	BNPB	-	-	Belum Tersedia
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD Provinsi Kalimantan Utara	orang		PM	18	Tidak ada Target & Baseline
<b>13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR)		Dokumen		-		Belum Tersedia
13.2.1 a	Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK	DLH	Kab/Kota	5 Kab/Kota			Belum Tersedia
<b>13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.						Indikator Global
13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.						Indikator Global
<b>13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang</b>							



<b>Tujuan 13 MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA.</b>							
<b>bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.						Indikator Global
<b>13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.						Indikator Global

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## 2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

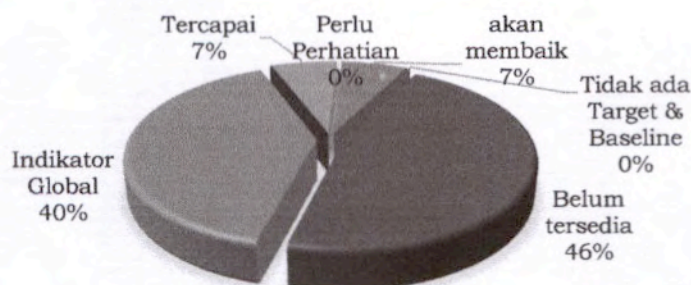
Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fisihing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil.

Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 14, dari 15 indikator diatas diantaranya ialah:

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 1 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 1 Indikator
3. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 7 Indikator
4. Indikator **Global** sebanyak 6 Indikator.

Jika dipersentasekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 14 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.15**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 14**  
**di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 14 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.15**

**Capaian Tujuan 14 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan</b>							
<b>14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
14.1..1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.						Indikator Global
<b>Target 14.2 Pada Tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
14.2..1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.						Indikator Global
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dok	1a (2016)	PM		belum tersedia
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dok	1a (2016)	PM		belum tersedia
<b>14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
14.3..1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.						Indikator Global
<b>Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Dinas Kelautan dan Perikanan	% (Target dibagi)	-			belum tersedia
Target 14.5 Pada Tahun 2020, Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
14.5.1*	Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jt Ha		0,0299	0,02553647	
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada The world Trade Organization							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
14.6..1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).						Indikator Global
14.6.1. (a)	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	73a	84,49	88,95	
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara -negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.						Indikator Global
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.							



Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.						Indikator Global
Target 14.b.1* menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Regulasi /Kebijakan		2			Belum Tersedia
14.b.1.(a)	Jumlah Provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Lokasi	34a (2016)			Belum Tersedia
14.b.1.(b)	Jumlah Nelayan yang terlindungi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Orang	5650	2339	0	Belum Tersedia
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).		Dokumen Ratifikasi	-			belum tersedia

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



### 2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

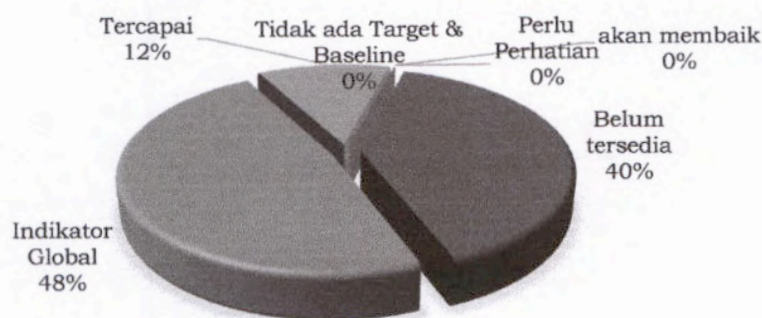
Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati.

Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 15, dari 25 indikator diatas diantaranya ialah,

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 3 Indikator
2. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 10 Indikator
3. Indikator **Global** sebanyak 12 Indikator.

Jika dipersentasekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 15 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.16**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 15**  
**di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 15 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.16**

**Capaian Tujuan 15 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 15 Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi (Penggurunan), Menghambat Degradasi Tanah dan Menghambat Hilangnya Keanekaragaman Hayati</b>							
<b>Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.1..1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.						Indikator Global
15.1.1.(a).	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	%	80%	2	2	Belum Tersedia
15.1..2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.						Indikator Global
<b>Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.						Indikator Global
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Ha	-			Belum Tersedia
15.2.1.(b).	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Ha	-			Belum Tersedia
15.2.1.(c).	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan	KPA	-			Belum Tersedia



Tujuan 15 Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi (Penggururan), Menghambat Degradasi Tanah dan Menghambat Hilangnya Keanekaragaman Hayati							
		Provinsi Kalimantan Utara					
15.2.1.(d).	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	KPHK	-	14	14	
<b>Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggururan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggururan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.						Indikator Global
15.3.1.(a).	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Ha	1.655	PM	7.254	
<b>15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.						Indikator Global
15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan						Indikator Global
<b>Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	%	-	-		belum tersedia
<b>Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.</b>							



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

<b>Tujuan 15 Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi (Penggurunan), Menghambat Degradasi Tanah dan Menghambat Hilangnya Keanekaragaman Hayati</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	PIC	-	-		belum tersedia
<b>Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.						Indikator Global
15.7.1.(a).	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	%	-	-		belum tersedia
15.7.1.(b).	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Spesies	-	-		belum tersedia
<b>Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).						Indikator Global
15.8.1.(a).	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Dokumen	4	4	4	
<b>Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.</b>							



<b>Tujuan 15 Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi (Penggurunan), Menghambat Degradasi Tanah dan Menghambat Hilangnya Keanekaragaman Hayati</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020						Indikator Global
15.9.1.(a).	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Dokumen	-	1		belum tersedia
<b>15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.						Indikator Global
<b>15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.						Indikator Global
<b>15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.</b>							
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.						Indikator Global



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 15 Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi (Penggurunan), Menghambat Degradasi Tanah dan Menghambat Hilangnya Keanekaragaman Hayati						
15.c.1.(a).	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	%	-	-	belum tersedia

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## **2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh**

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong Institutions*). Tujuan 16 memiliki 12 (dua belas) target dengan 52 indikator TPB/SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030. Target yang akan dicapai adalah mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi.

Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 16, dari 52 indikator diatas diantaranya ialah,

1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 6 Indikator
2. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik** sebanyak 2 Indikator
3. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 25 Indikator
4. Indikator **sudah terlaksana tetapi tidak ada Target & Baseline** sebanyak 1 Indikator
5. Indikator **Global** sebanyak 18 Indikator.

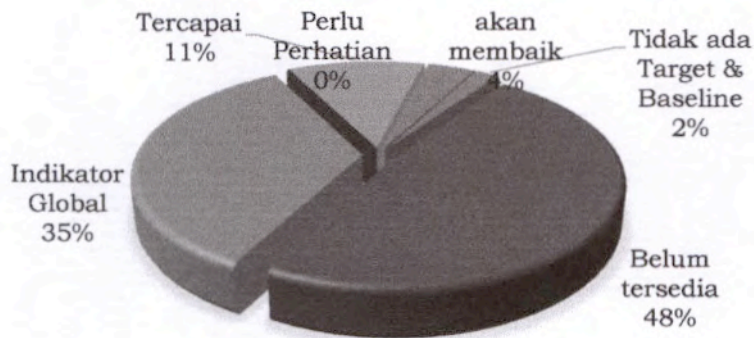
Berdasarkan data diatas, pada indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir (sudah dilaksanakan dan berstatus tercapai); 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi (sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik); 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil (sudah dilaksanakan dan berstatus akan membaik);



16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik (sudah dilaksanakan dan berstatus tercapai) masih menggunakan data Tahun 2018, dikarenakan Tahun 2020 belum tersedia.

Jika dipersentasekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 16 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.17**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 16 di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 16 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.17**

**Capaian Tujuan 16 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan SDGs Goal 16: Memperkuat Masyarakat Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan</b>							
<b>Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.						Indikator Global
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	BPS dan Polda Kaltara	Kasus	-			belum tersedia
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.						Indikator Global
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	BPS dan Polda Kaltara	Kematian/	-			belum tersedia
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.						Indikator Global
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik Kriminal	%	0,09	PM	0,01 (2018)	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Susenas Model Hansos	%	56,58			belum tersedia
<b>Target 16.2 Menghentikan Perlakuan Kejam, Eksploitasi, Perdagangan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan Terhadap Anak</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari						Indikator Global



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan SDGs Goal 16: Memperkuat Masyarakat Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan							
	pengasuh dalam sebulan terakhir.						
16.2.1 a	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS Provinsi Kalimantan Utara	%	0	PM		belum tersedia
16.2.1 b	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	BPS Provinsi Kalimantan Utara	%	0	Menurun		Belum tersedia
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.						Indikator Global
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.						Indikator Global
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	BPS dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara	%	0	Menurun		belum tersedia
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang						Indikator Global



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan SDGs Goal 16: Memperkuat Masyarakat Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan							
	yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.						
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Robinops	%	-	PM		belum tersedia
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	BPHN (Kementerian)	Orang	-	-		belum tersedia
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Badilag, Badilum dan	Perkara	-	-		belum tersedia
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.						Indikator Global
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Ditjen Pemasyarakatan	%	-	-		belum tersedia
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).						Indikator Global
16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.						Indikator Global
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap						Indikator Global



Tujuan SDGs Goal 16: Memperkuat Masyarakat Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan							
	kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.						
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	Indeks	-	PM		Belum tersedia
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas- petugas, selama 12 bulan terakhir.						Indikator Global
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Kementerian Keuangan	%	-	PM		Belum tersedia
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Badan Pemeriksa Keuangan	%		WTP	WTP	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	KemenPAN RB	%	-	-		belum tersedia
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	%	-	-		belum tersedia
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	KemenPAN RB	%	-	cc		belum tersedia



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan SDGs Goal 16: Memperkuat Masyarakat Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan							
	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.						Indikator Global
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI	%	-	-		belum tersedia
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.						Indikator Global
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	KPU	%	-	-		belum tersedia
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKN; Sakernas BPS	%	-	Meningkat	0,09%	Tidak ada target & Baseline
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.						Indikator Global
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS dan Kemenko Polhukam	Indeks	78,93	PM	68,95 (2018)	



Tujuan SDGs Goal 16: Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS dan Kemenko Polhukam	Indeks	98,57	PM	97,36 (2018)	
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS dan Kemenko Polhukam	Indeks	68,54	PM	75,8 (2018)	
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional						Indikator Global
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Susenas (BPS)	%	85,68	PM	90,18	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Basis Data Terpadu (Kementerian Sosial)	%	88,33	88,59	88,85	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Susenas (BPS)	%	82,81	PM	87,47	
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang						Indikator Global



Tujuan SDGs Goal 16: Memperkuat Masyarakat Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan							
	dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.						
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komnas HAM; Ditjen HAM (Kemenkum HAM)	Berkas Pengaduan	-	-		belum tersedia
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komnas Perempuan	%	-	-		belum tersedia
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	World Bank, UNESCO, UNDP, Akademi dan Institusi Riset, Komisi Informasi Pusat	negara	-	-		belum tersedia
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	-	-		belum tersedia
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	-	-		belum tersedia
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	-	-		belum tersedia
<b>Target 16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang	Komnas HAM	Lembaga	-	-		belum tersedia



Tujuan SDGs Goal 16: Memperkuat Masyarakat Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan							
independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .							
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						Indikator Global
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perempuan	Kebijakan/ Dokumen	-	-		Belum tersedia

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## 2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, dan 51 indikator. Target Tujuan 17 terdiri atas (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (iii) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (iv) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (v) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data.

Capaian Provinsi Kalimantan Utara pada Tujuan 17, dari 50 indikator di atas diantaranya ialah,

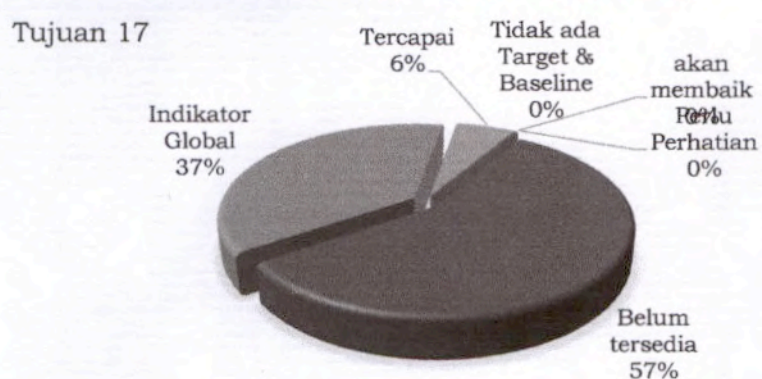
1. Indikator **sudah dilaksanakan dan berstatus sudah mencapai Target** sebanyak 3 Indikator
2. Indikator **tidak tersedia data** sebanyak 29 Indikator
3. Indikator **Global** sebanyak 18 Indikator.

Berdasarkan data di atas, pada indikator 17.8.1\* Proporsi individu yang menggunakan internet (sudah dilaksanakan dan berstatus tercapai) masih menggunakan data Tahun 2019, dikarenakan Tahun 2020 belum tersedia.

Jika dipersentasekan, capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 17 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.18**  
**Persentase Capaian TPB/SDGs Tahun 2020 Tujuan 17**  
**di Provinsi Kalimantan Utara**



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2020

Berikut tabel capaian Tujuan 17 di Provinsi Kalimantan Utara:



**Tabel 2.18**

**Capaian Tujuan 17 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

<b>Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan</b>							
<b>Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS: Statistik Keuangan	%	-			Belum Tersedia
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan	%	-			Belum Tersedia
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Kementerian Keuangan	%	-			Belum Tersedia
<b>17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/ GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.						Indikator Global
<b>Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.						Indikator Global



Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.						Indikator Global
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI dan BI	%	-			Belum Tersedia
<b>17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Bank Indonesia	%	-			Belum Tersedia
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.						Indikator Global
<b>Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/ atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya						Indikator Global
17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Kegiatan	-	-	-	Belum tersedia
17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.						Indikator Global
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/ Kota (IKK).	DISKOMINFO	%	-	-	-	Belum tersedia



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.6.2.(b)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	DISKOMINFO	%	-	-	-	Belum tersedia
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	DISKOMINFO	%	-	-	-	Belum tersedia
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.						Indikator Global
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DISKOMINFO	%	36,4	PM	54,3 (2019)	
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	DISKOMINFO	%	99a (2016)			Belum Tersedia
Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.						Indikator Global
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Milyar	-			Belum Tersedia



<b>Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan</b>							
<b>Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).						Indikator Global
17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).	Kementerian Perdagangan, World	Rata-rata tarif terbobot	-	-	-	Belum Tersedia
<b>Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.						Indikator Global
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	15,83a	5	17,54	
<b>Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negaranegara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.						Indikator Global
<b>Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Kementerian Koordinator Bidang	Dashboard	-			Belum Tersedia
<b>7.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan						Indikator Global



Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan							
	kebijakan pembangunan berkelanjutan.						
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.						Indikator Global
Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.						Indikator Global
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).						Indikator Global
17.17.1.(a)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		Alokasi	-	-		Belum Tersedia
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kementerian Koordinator Bidang	Dokumen berisi daftar proyek KPBU	-	-		Belum Tersedia
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.18.1	JProporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.						Indikator Global
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Badan Pusat Statistik	%	-	PM	100	
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Kebutuhan Data.		-	-		Belum Tersedia
17.18.1.(c)	Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Badan Pusat Statistik:	Metadada	-	-		Belum Tersedia
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Pusat Statistik.	%	-	-		Belum Tersedia
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Badan Pusat Statistik.	UU	-	-		Belum Tersedia
17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Badan Pusat Statistik mengajukan	Review	-	-		Belum Tersedia
17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.						Indikator Global
17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).		Strategi Nasional	-	-		Belum Tersedia
<b>Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</b>							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun 2020 (8)	Capaian SDGs Tahun 2020 (9)	Status (10)
17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas						Indikator Global



Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan						
	statistik di negaranegara berkembang.					
17.19.1.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	Badan Pusat Statistik: Laporan	Pegawai	-	-	Belum Tersedia
17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Badan Pusat Statistik: Laporan	%	-	-	Belum Tersedia
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.	Badan Pusat Statistik: Laporan	%	-	-	Belum Tersedia
17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.					Indikator Global
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Badan Pusat Statistik: Sensus	Sensus	-	-	Belum Tersedia
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Kementerian Dalam Negeri.	Data	-	-	Belum Tersedia
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Badan Pusat Statistik	Pengunjung	-	-	Belum Tersedia
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Badan Pusat Statistik	Kebutuhan Data.	-	-	Belum Tersedia
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Survei	%	-	-	Belum Tersedia

Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



## 2.18. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan TPB/SDGs

Pencapaian target indikator pada RAD TPB/SDGs Tahun 2018-2021 didukung oleh program dan kegiatan baik dari pemerintrah daerah maupun nonpemerintah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 17 Tujuan TPB oleh perangkat daerah, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dan kendala. Secara umum, tantangan dan kendala tersebut diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Kendala dan Tantangan Pelaksanaan TPB Tahun 2020**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

<b>Kendala dan Tantangan</b>
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
a. Kesenjangan tingkat pendidikan (pedalaman, pesisir, perbatasan) cenderung jauh lebih tertinggal dibanding dengan perkotaan;
b. Fasilitas Sarana dan Prasarana pendidikan yang belum memadai terutama didaerah di daerah 3T;
c. Kualitas Pendidikan yang masih rendah sesuai data hasil ujian bahwa capaian nilai yang diperoleh masih dibawah standar yang rata-rata nilainya adalah D;
d. APK PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK masih rendah di bawah rata2 Nasional;
e. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap arti pentingnya pendidikan bagi anaknya;
f. Kekurangan tenaga pendidik dan penyebaran belum merata;
g. Pengalokasian anggaran.
<b>Dinas Kesehatan</b>
a. Kondisi pandemi covid-19 yang melanda seluruh daerah di Indonesia sehingga terjadi perubahan-perubahan yang wajib di ikuti dengan menyesuaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta perubahan anggaran (refocusing) yang dialihkan untuk penanganan covid-19;
b. Sarana dan prasarana yang masih sangat minim di provinsi Kalimantan Utara dan peningkatan profesionalitas SDM dan pendistribusiannya yang belum merata
<b>Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>
a. Proses lelang berjalan lama sehingga waktu pengerjaan menjadi berkurang;
b. Cuaca yang tidak mendukung menyebabkan pekerjaan di lapangan menjadi terhambat dan tidak tepat waktu;
c. Penyedia jasa kurang baik dalam mengatur waktu pekerjaan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan;
d. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM



### Kendala dan Tantangan

- e. Adanya wabah pandemi yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan karena penyesuaian pola kebiasaan normal baru.

### Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

- a. Perencanaan yang kurang matang sehingga adanya beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah 65%, diantaranya: Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja realisasinya hanya 59,46% dikarenakan tempat service alat elektronik yang ada di wilayah Tanjung Selor yang terbatas;
- b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan dimana realisasinya hanya 61,84% dikarenakan anggaran yang besar untuk kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan.

### Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Adanya pandemi Covid-19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat penanganan Covid-19;
- b. Keterlambatan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Belum adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan serta pencairan anggaran kegiatan sehingga sering terjadi ketidak sinkronan;
- d. Kurangnya pemahaman pegawai terkait konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan serta pencairan dana kegiatan.

### Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DPPPAPPKB)

- a. Masih terbatasnya SDM terlatih di OPD khususnya sub urusan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender;
- b. Masih terbatasnya ketersediaan data pilah di semua OPD;
- c. Kentalnya budaya patriarki yang seringkali mendiskriminasi perempuan;
- d. Adanya anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki;
- e. Belum maksimalnya peran aktif organisasi/kelembagaan perempuan dalam pembangunan;
- f. Adanya pandemic covid-19 di tahun 2020

### Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Pelaksanaan rapat – rapat dan koordinasi khususnya ke luar daerah tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena mempertimbangkan dampak pandemi covid-19 khususnya pada daerah yang berada pada zona merah dan zona hitam, sehingga anggaran untuk rapat-rapat dan koordinasi di luar daerah tidak dapat diserap dengan maksimal;
- b. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak seperti sosialisasi dan fasilitasi pelayanan pada masyarakat.

### Dinas Lingkungan Hidup



### Kendala dan Tantangan

- a. Terkendalanya Pelaksanaan Kegiatan Akibat adanya wabah pandemi Covid-19;
- b. Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya di nolkan tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi covid-19.

### Dinas Perhubungan

- a. Beberapa kavling tanah tidak bisa terbayarkan/terbebaskan dikarenakan status lahan yang belum "clean and clear";
- b. Adanya pandemic covid-19 berdampak pada kurangnya penumpang sehingga intensitas penggunaan bis menurun yang berdampak pada minimnya realisasi penggunaan BBM dan pemeliharaan kendaraan karena disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. Sisa lelang paket pekerjaan dan pengadaan bollard serta pemeliharaan rutin gedung kantor dan dermaga pelabuhan yang minim realisasi dikarenakan kurangnya kerusakan selama tahun 2020;
- d. Sisa pembayaran untuk pembebasan lahan Pelabuhan Pesawan dikarenakan adanya pihak-pihak yang bersengketa terkait kepemilikan lahan yang memilih penyelesaian perkara melalui proses peradilan. Selain itu terdapat pihak yang menggugat terkait nilai yang ditetapkan oleh tim appraisal pembebasan lahan Pelabuhan Pesawan.

### DISPERINDAGKOP

- a. Bidang Industri terdapat pembangunan fisik rumah garam krayan yang terlaksana 41% dikarenakan bahan bangunan/material di daerah Krayan mengalami kelangkaan dikarenakan ditutupnya perdagangan perbatasan di kedua negara, kegiatan pameran dekranasda juga tidak dilaksanakan karena covid19. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya mengalami refocusing
- b. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdapat kegiatan pembangunan pasar bunyu yang hanya terealisasi sebesar 71% dikarenakan material bahan bangunan berupa batu yang berasal dari kota Palu mengalami keterlambatan datang dan harga material tidak sesuai dengan anggaran belanja dan kegiatan sosialisasi yang batal dilaksanakan karena pembatasan mengumpulkan orang untuk mencegah penyebaran covid19;
- c. Bidang Perdagangan Luar Negeri terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan promosi perdagangan/pameran, kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang tidak bisa dilaksanakan karena covid 19
- d. Bidang Koperasi dan UKM terdapat kegiatan pameran Harkopnas yang tidak bisa dilaksanakan dan kegiatan pelatihan manajemen yang rencanakan akan dilaksanakan di 5 kab/kota hanya bisa dilaksanakan di Tanjung Selor. Kedua kegiatan tersebut terkendala karena pembatasan sosial untuk pencegahan penyebaran covid19

### Dinas Kelautan dan Perikanan

- a. Adanya anjuran mengurangi aktivitas diluar rumah pada saat pandemi membuat produksi perikanan tangkap nelayan menurun;



#### **Kendala dan Tantangan**

- b. Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan kurang optimal;
- c. Nelayan belum mampu memaksimalkan zona penangkapan ikan sesuai lokasi yang ditentukan hal ini mengacu pada peraturan daerah provinsi kalimantan utara nomor 4 tahun 2018;
- d. Masyarakat pembudidaya sebagian besar masih menerapkan teknologi konvensional dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha pembudidaya;
- e. Kompetisi pelaku industri perikanan belum memadai untuk menghadapi persaingan dipasar global.

#### **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

- a. Belum optimalnya peran pengawasan internal di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Dalam pengadaan alsintan di Bidang PSP, semestinya menggunakan sistem pembelian menggunakan e-katalog sectoral pada website LKPP, namun untuk Tahun 2020 kebijakan pembelian alsintan harus ijin atau menyampaikan permohonan tertulis untuk membeli ke LPSE Kementerian Pertanian RI yang akhirnya menyebabkan keterlambatan proses pengadaan

#### **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

- a. Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan ditunda atau dibatalkan pelaksanaannya;
- b. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas ESDM;
- c. Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi yang bersinggungan.
- d. Belum adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pencairan anggaran kegiatan sehingga terjadi ketidaksinkronan.

Sumber: LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, diolah



### **BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs**

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II sebanyak 289 indikator dari sebelumnya pada Edisi I mencakup 319 indikator atas 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs Indonesia. Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan menjadi rujukan penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs periode 2020-2024 serta Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II dikelompokan dalam 4 (empat) dokumen yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16).

Dengan memperhatikan pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 pada periode RPJMD sebelumnya sebagaimana telah disajikan pada Bab II, maka ditentukan target dan arah kebijakan pencapaian TPB untuk periode pembangunan 5 tahun berikutnya, sesuai dengan sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Rencana program perangkat daerah pada RPJMD secara operasional dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kedua dokumen perencanaan ini menjadi pedoman dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra PD Tahun 2021-2026. Penetapan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang diikuti dengan



Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, menjadi pedoman bagi pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Utara mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah memiliki keselarasan, sehingga visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Dalam mencapai visi RPJMD, ditetapkan 14 misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- 2) Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
- 3) Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
- 4) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 5) Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
- 6) Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
- 7) Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;



- 8) Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
- 9) Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
- 10) Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- 11) Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
- 12) Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
- 13) Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
- 14) Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada RPJMD Tahun 2021-2026 meliputi:

- 1) Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan
- 2) Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota
- 4) Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota
- 5) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan Di Kabupaten/Kota.
- 6) Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota
- 7) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan
- 8) Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial
- 9) Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota



- 10) Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehataaan Serta Tenaga Honorer di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Gerakan Kaltara Rumah Kita sebagai wujud tekad, semangat dan harapan rakyat, serta visi dan misi Kalimantan Utara mencakup enam Gerakan, yakni: (1) Gerakan RT-Bersih; (2) Gerakan Desa Membangun; (3) Gerakan Revitalisasi Kecamatan; (4) Gerakan Menata Kota; (5) Gerakan Memajukan Kabupaten/Kota; dan (6) Gerakan Inovasi Daerah. Enam Gerakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) **Gerakan RT-Bersih**

Gerakan RT-Bersih merupakan gerakan yang diarahkan untuk menguatkan peran warga RT (Rukun Tetangga) dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis (RT-BERSIH) melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara. Program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui Gerakan RT-Bersih ditujukan untuk merealisasikan ketertiban, keamanan, kemandirian, dan kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa/kelurahan serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.

2) **Gerakan Desa Membangun**

Gerakan Desa Membangun merupakan gerakan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan setiap desa/kelurahan; serta meningkatkan kapasitas aparat Pemerintah Desa/ Kelurahan melalui fasilitasi, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan pendampingan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara. Program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui Gerakan Desa Membangun ditujukan untuk merealisasikan kemandirian, dan kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa/kelurahan; ketahanan pangan; inovasi-inovasi dan keunggulan desa/kelurahan; ketangguhan



terhadap bencana dan perubahan iklim; serta konektivitas antar desa/kelurahan.

**3) Gerakan Revitalisasi Kecamatan**

Gerakan Revitalisasi Kecamatan merupakan gerakan yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan setiap kecamatan berbasis keunggulan desa/kelurahan; serta menguatkan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan pusat pengembangan kawasan ekonomi melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan; serta peningkatan kapasitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara.

**4) Gerakan Menata Kota**

Gerakan Menata Kota merupakan gerakan yang diarahkan untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten/kota menjadi lebih nyaman, bersih, aman dan maju sebagai titik simpul dari keterkaitan desa dan kota melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha dan mitra pembangunan.

**5) Gerakan Memajukan Kabupaten/Kota**

Gerakan Memajukan Kabupaten/Kota merupakan gerakan diarahkan untuk menguatkan peran Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menjalankan fungsi pemerintahan; meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan daerah di setiap desa/kelurahan dan kecamatan; serta menjamin kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas oleh perangkat daerah; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha dan mitra pembangunan.



#### 6) Gerakan Inovasi Daerah

Gerakan Inovasi Daerah merupakan gerakan yang diarahkan untuk melakukan perubahan melalui berbagai inovasi, meliputi: inovasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan; inovasi dalam meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik; inovasi dalam mengembangkan daya saing dan keunggulan daerah di setiap desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota; inovasi dalam menjamin kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan; dan inovasi dalam perluasan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha dan mitra pembangunan.

Target indikator TPB untuk mendukung pelaksanaan setiap TPB disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan didukung oleh RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Utara. Tahun perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara mulai tahun 2022 sampai dengan 2026. Penyusunan RAD TPB juga mendapat dukungan program dan kegiatan dari nonpemerintah (*non stateactor*), baik lembaga kemasyarakatan, filantropi, academia, maupun perusahaan.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota yang digunakan dalam mendukung pencapaian target TPB Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:

1. RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026
2. RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026
3. RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026
4. RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026
5. RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024

Rencana aksi ini disusun sesuai kewenangan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Terdapat sebagian indikator TPB yang merupakan kewenangan atau dilaksanakan untuk pemerintah pusat, sehingga tidak diisi target indikatornya oleh pemerintah daerah. Indikator TPB lainnya yang tidak diisi disebabkan tidak direncanakan targetnya pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026.

Indikator TPB Provinsi Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2026 sebanyak 148. Indikator TPB pada Pilar



Sosial berjumlah 59, Pilar Ekonomi sebanyak 34, Pilar Lingkungan berjumlah 38, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 17.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Indikator TPB Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2021-2026**

TPB	Jumlah Indikator TPB
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	10
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	21
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	11
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	6
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	7
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	3
Tujuan 8: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	13
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	3
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	8
Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	8
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	6
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	7
Tujuan 14 Ekosistem Lautan	4
Tujuan 15 Ekosistem Daratan	6
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	17
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	7
<b>JUMLAH</b>	<b>148</b>

Sumber: hasil analisis, 2021

Adapun target indikator sebagai rencana aksi pencapaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang disajikan berdasarkan TPB diuraikan sebagai berikut:



### 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan



Tujuan 1 TPB yaitu Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.2**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 1.1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari</b>											
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	RPJMD	Persen	7,0-6,8	7,0-6,8	7,0-6,73	6,7-6,0	6,1-5,9	5,8-5,7	5,6-5,2	Indikator RPJMD Bab 8: Angka Kemiskinan
<b>Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional</b>											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	RPJMD	Persen	7,0-6,8	7,0-6,8	7,0-6,73	6,7-6,0	6,1-5,9	5,8-5,7	5,6-5,2	Indikator RPJMD Bab 8: Angka Kemiskinan
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	RPJMD	Persen	7,0-6,8	7,0-6,8	7,0-6,73	6,7-6,0	6,1-5,9	5,8-5,7	5,6-5,2	Indikator RPJMD Bab 8: Angka Kemiskinan
<b>Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</b>											
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Renstra Dinas Sosial	orang	47200	39277	40118	40997	41878	42555	43284	Indikator Renstra Dinsos Bab 4: Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Renstra Dinas Kesehatan	Jiwa			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 6: Jumlah masyarakat yang tercover BPJS PBI Provinsi



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Renstra Disnakertrans	Persentase	31,16	30,45	34,78	38,40	42,02	45,64	49,26	Indikator Sasaran Renstra Disnakertrans Prov. Kaltara Tahun 2021-2026 (Bab IV) sejenis yaitu Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Baseline bersumber dari LKJIP Tahun 2020 dan Pengukuran Kinerja Triwulan III
<b>Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</b>											
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Renstra Dinas PUPR-PERKIM	Meter	0	0	0	1000	1000	1000	1000	Indikator Renstra Dinas PUPR Bab 6 dan 7: Panjang Jaringan Perpipaan yang dibangun
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Renstra Sekretariat Daerah	Persen		100	100	100	100	100	100	Indikator Renstra Sekretariat Daerah Bab 6: Persentase keberhasilan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi
<b>Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</b>											
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang										
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.										
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030										



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	Renstra BPBD	Persen			30	50	65	80	100	Indikator Renstra BPBD Bab 6 dan 7: Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal
		Renstra BPBD	Persen			30	40	50	60	70	Indikator Renstra BPBD Bab 6 dan 7: Persentase Penanganan Pra Bencana
<b>Target 1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</b>											
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Renstra Dinas Sosial	Orang	47200	39277	40118	40997	41878	42555	43284	Indikator Renstra Dinsos Bab 4: Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial
		Renstra Dinas Sosial	Persen		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	Indikator Renstra Dinsos Bab 4: Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial
		Renstra Dinas Sosial	Persen		0,0112	0,0478	0,1409	0,2404	0,3463	0,5613	Indikator Renstra Dinsos Bab 4: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.										

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam mencapai target indikator TPB pada Tujuan 1, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan umum dan sektoral, yaitu:

1. Arah Kebijakan Umum
  - a. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
  - b. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat.
  - c. Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Urusan Sosial
  - a. Difokuskan pada kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar PPKS terlantar di dalam panti milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Panti milik masyarakat dan diarahkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar PPKS terlantar didalam panti dan presentase keberfungsian sosial PPKS di dalam panti.
  - b. Difokuskan pada kegiatan jaminan sosial bagi PPKS non produktif dan penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana provinsi dan diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap korban bencana provinsi dan penyelenggaraan jaminan sosial PPKS non produktif.
  - c. Difokuskan pada kegiatan penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan diarahkan pada peningkatan peran PSKS dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.
  - d. Difokuskan pada kegiatan penanganan bencana alam dan sosial untuk meningkatkan kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya.
  - e. Difokuskan pada kegiatan bimbingan sosial dan motivasional terhadap keluarga fakir miskin dan pengelolaan data kemiskinan dan PPKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi.
3. Urusan Kesehatan
  - a. Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi.
  - b. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi.
  - c. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.



- d. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi.
  - e. Pengadaan Alat Kesehatan RS.
  - f. Pembangunan Gedung Bedah Central dan Jantung Terpadu serta Radioterapi.
  - g. Pengadaan SIMRS yang terintegrasi.
  - h. Menjadikan RSUD Tarakan Provinsi Kaltara Rumah Sakit Tipe A.
  - i. Pengadaan Kebutuhan Mesin Oksigen Generator untuk penanganan Covid -19.
  - j. Pengembangan Pelayanan dengan mengusulkan pengadanan Alat Cathlab dan Radioterapi.
  - k. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi (Dokter Spesialsi dan SubSpesialis).
  - l. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi.
  - m. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
  - n. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (ukot).
  - o. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi.
  - p. Pelaksanaan Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi.
  - q. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi.
4. Urusan Tenaga Kerja
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan.
  - b. Memberikan pelatihan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
  - c. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja.
  - d. Memfasilitasi penyediaan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
  - e. Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
  - f. Mendukung penciptaan lapangan kerja baru.
  - g. Membangun database ketenagakerjaan.
  - h. Membangun koordinasi yang baik antara pusat, daerah dan lembaga swasta.



- i. Memfasilitasi penyelesaian kasus hubungan industrial secara cepat dan tepat.
  - j. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan mengenai hubungan industrial.
  - k. Memfasilitasi penyusunan perangkat hubungan industrial.
  - l. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM mediator.
  - m. Memberi pemahaman kepada seluruh pihak terkait agar melakukan penentuan upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - n. Bersama dengan pemerintah daerah memberi pencerahan kepada perusahaan mengenai unsur kesejahteraan pekerja, yang tidak hanya didasarkan pada upah.
  - o. Mengoptimalkan pemeriksaan norma kerja dan K3 terhadap perusahaan.
  - p. Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan terkait kepesertaan pekerja terhadap jaminan sosial.
  - q. Memberikan sosialisasi dan edukasi penerapan norma kerja dan K3.
  - r. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengawas Ketenagakerjaan.
5. Urusan Pendidikan
- a. Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
  - b. Membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta.
  - c. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan melalui pemberian perlengkapan dasar peserta didik dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah.
  - d. Membina satuan pendidikan menengah untuk membuka pendidikan inklusif untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus.
  - e. Menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama.
  - f. Memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak, khususnya yang berada di wilayah pedalaman.



- g. Mendukung pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat mendorong anak-anak yang tidak bersekolah untuk kembali mengikuti Pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.
- h. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam peningkatan kualitas pembelajaran termasuk mengembangkan kurikulum pada SMK yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (*demand driven*); (2) Kebersambungan (link) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja.
- i. Mengembangkan SMK menjadi *Centers of Excellence* guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di Kalimantan Utara.
- j. Optimalisasi Program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan SMA dan SLB melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) sekolah berupa program pelatihan dan pendampingan intensif serta pembelajaran dengan paradigma baru (berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter), perencanaan berbasis data, penggunaan berbagai platform digital yang bertujuan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi serta pendampingan program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah.
- k. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan satuan pendidikan terkait pemutakhiran database lulusan sehingga lulusan yang melanjutkan pendidikan, bekerja atau berwirausahaan dapat ditelusuri dan dibina untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- l. Memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah.
- m. Mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru.
- n. Mengembangkan pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan profesionalitas dan motivasi dalam rangka meningkatkan karir serta penguatan kualitas layanan di satuan pendidikan.

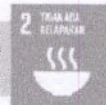


- o. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian insentif dan honorarium untuk jenjang sekolah menengah dan SLB.
  - p. Mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survey lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru.
  - q. Membina satuan Pendidikan dalam rangka penerapan standar nasional Pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru.
  - r. Melakukan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan profesional baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) untuk mendukung pembelajaran berkualitas.
6. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- a. Mewujudkan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.
  - b. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.
  - c. Mewujudkan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
  - d. Mewujudkan pelayanan SPAM yang aman.
  - e. Mewujudkan pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
  - f. Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
7. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- a. Menyediakan kajian resiko bencana.
  - b. Mengoptimalkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).
  - c. Menyediakan rencana penanggulangan bencana.
  - d. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.
  - e. Mengoptimalkan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana.
  - f. Menyediakan pengelolaan risiko bencana dan rencana kontijensi.
  - g. Menyediakan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
  - h. Membuat regulasi penanggulangan bencana daerah.



- i. Memperkuat kelembagaan bencana daerah dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.
- j. Menyediakan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan.
- k. Menetapkan SOP sebagai acuan parameter personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- l. Mengadakan kerjasama secara berkelanjutan dengan aparat Penegak Hukum melalui MOU atau nota kesepakatan.
- m. Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban serta upaya meminimalisir pelanggaran peraturan daerah.
- n. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana.
- o. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personil Satuan Polisi Pamong Praja dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

### 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan



Tujuan 2 TPB yaitu Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.3**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 2 Tanpa Kelaparan**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</b>											
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	RPJMD	Poin	71,9 (Tahun 2020; Tahun 2021 tidak ada data)		72	72,5	73,1	73,7	74,3	Indikator RPJMD Bab 8: Indeks Ketahanan Pangan
		RPJMD	Persen	75	80	85	90	95	100	100	Indikator RPJMD Bab 8: Persentase Cadangan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	20	n/a	14	11	9	7	5	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Persentase desa rentan rawan pangan
<b>Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Renstra Dinas Kesehatan	Persen	25	25	20	16	12	10	10	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 7: Persentase stunting
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	11	10,5	10	10	9	9	8	Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Tana Tidung: Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
		Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan	Persen			18,40	16	14	14	14	Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan: Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
		Renstra Dinas Kesehatan Kab. Nunukan	Persen			<20%	20	18,5	16	14	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Nunukan Bab 7: Prevalensi Stunting
		- RPJMD - Renstra Dinas Pertanian dan	poin	80,5		82,6	83,6	84,7	85,7	86,8	Indikator RPJMD Bab 7 dan Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 4 dan 6: Peningkatan skor PPH



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Ketahanan Pangan										
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Renstra Dinas Kesehatan	kab/kota	5	n/a	5	5	5	5	5	5	Indikator Renstra Dinas Kesehatan: Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	4,10	4,05	4	3,90	3,80	3,70	3,60		Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Tana Tidung: Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
		Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan	Persen			7,50	7,30	7	7	7		Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan: Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita
		- RPJMD - Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	poin	80,5		82,6	83,6	84,7	85,7	86,8		Indikator RPJMD Bab 7 dan Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 4 dan 6: Peningkatan skor PPH
2.2.2 (a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	- RPJMD - Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	poin	80,5	n/a	82,6	83,6	84,7	85,7	86,8		Indikator RPJMD Bab 7 dan Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 4 dan 6: Peningkatan skor PPH
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	8	8	8	7	7	6	6		Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Tana Tidung: Prevalensi anemia pada ibu hamil.
<b>Target 2.3. Pada tahun 2030, mengandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.</b>												
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan	Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	-14% (65.596 ton)		2	2	2	2			Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 4: Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan											
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.											



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan roduktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif emperbaiki kualitas tanah dan lahan.</b>											
2.4.1 (a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen		100	100	100	100	100	100	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan
<b>Target 2.5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragaman dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.</b>											
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kab/Kota			5	5	5	5	5	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.										
<b>Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.</b>											
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.										
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Paket			1	1	1	1	1	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah bantuan sarana produksi hortikultura yang di distributikan
		Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ton			24.850	25.000	25.010	25.012	25.012	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah Benih Bersertifikat dan Berlabel Biru yang didistribusikan
		Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Benih siap tanam			3500	3510	3560	3570	3570	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah benih yang di distribusikan
		Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ekor			13	15	15	13	18	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah bibit ternak kerbau yg didistribusikan
		Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ekor			15	20	22	23	24	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah bibit sapi yg didistribusikan



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ekor			45	45	46	47	48	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah bibit sapi yg didistribusikan
		Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ekor			30	32	33	34	35	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah bibit kambing yg didistribusikan
		Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ekor			40	41	55	56	63	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah bibit babi yg didistribusikan
		Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ekor			2000	2010	2015	2015	2015	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah bibit itik yg didistribusikan
		Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ekor			2000	2010	2015	2015	2200	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah bibit ayam yg didistribusikan
		Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ekor			20	22	15	23	24	Indikator Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bab 6: Jumlah bibit sapi pejantan yg didistribusikan
<b>Target 2.b. Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.</b>											
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.										
<b>Target 2.c. Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.</b>											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	RPJMD	Persen	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	Indikator RPJM Bab 8: Persentase Inflasi Pangan Begejolak

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam mencapai target indikator TPB pada Tujuan 2, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Ketahanan Pangan
  - a. Melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan petani dalam pengembangan komoditas yang berorientasi pasar.
  - b. Melakukan kegiatan pendampingan poktan dan gapoktan dalam pengembangan komoditas yang prospektif dan memberikan keuntungan tertinggi per unit input yang digunakan.
  - c. Menjamin pemasaran produk komoditas pangan yang menguntungkan bagi petani, untuk menjamin peningkatan produksi menuju swasembada pangan.
  - d. Meningkatkan pemasaran produk hortikultura yang berkualitas tinggi keluar Provinsi Kalimantan Utara, antar daerah, antar pulau ataupun pasar internasional.
2. Urusan Kesehatan
  - a. Peningkatan pelayanan penanganan/pemulihan kesehatan akibat COVID-19, dan kesehatan ibu hamil, pencegahan stunting dan penyakit menular lainnya.
  - b. Meningkatkan aksesibilitas layanan fasilitas kesehatan ibu dan anak.
  - c. Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi.
  - d. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi.
  - e. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.
  - f. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi.
  - g. Pengadaan Alat Kesehatan RS.
  - h. Pembangunan Gedung Bedah Central dan Jantung Terpadu serta Radioterapi.
  - i. Pengadaan SIMRS yang terintegrasi.
  - j. Menjadikan RSUD Tarakan Provinsi Kaltara Rumah Sakit Tipe A.
  - k. Pengadaan Kebutuhan Mesin Oksigen Generator untuk penanganan Covid -19.
  - l. Pengembangan Pelayanan dengan mengusulkan pengadaan Alat Cathlab dan Radioterapi.

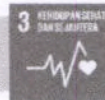


- m. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi (Dokter Spesialsi dan SubSpesialis).
  - n. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi.
  - o. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
  - p. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (ukot).
  - q. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi.
  - r. Pelaksanaan Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi.
  - s. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi.
3. Urusan Pertanian
- a. Meningkatkan nilai tawar program dan kegiatan DPKP untuk memperoleh dukungan pendanaan APBD maupun APBN.
  - b. Koordinasi dengan kabupaten/kota dapat berjalan dengan lancar dalam hal penetapan komoditas unggulan daerah dan lokus kegiatan.
  - c. PPL mempunyai wawasan yang luas dan keterampilan yang tinggi dalam membimbing dan mendampingi petani berproduksi dan mengelola kegiatasaan usaha pertaniannya.
  - d. Petani dapat mengelola kegiatan pertaniannya dari pendekatan tradisional subsisten menjadi berpendekatan komersial dan berorientasi pasar.
  - e. Kapasitas peringkat kelompok tani meningkat.
  - f. Meningkatkan kualitas kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dalam kegiatan produksi dan pengelolaan usaha tani.
  - g. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas padi dan palijawa.
  - h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditas hortikultura.
  - i. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan.
  - j. Meningkatkan populasi dan kesehatan ternak.
  - k. Mengembangkan sistem pertanian terpadu berdasarkan analisis sumber daya loka yang tersedia.
  - l. Tersusun regulasi tentang “meningkatkan efektivitas penggunaan SDA sebagai sumber daya utama pembangunan pertanian dalam arti luas



- untuk mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB.
- m. Kegiatan pertanian rakyat berjalan secara sinergis dan bersimbiosis mutualisme dengan perusahaan pertanian yang berkegiatan di Provinsi Kalimantan Utara.
  - n. Perusahaan pertanian yang berkembang di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kontribusi yang nyata terhadap peningkatan PDRB dari sektor pertanian.
  - o. Mengembangkan integrasi sapi-sawit, atau sapi-padi dengan sistem kandang komunal.
  - p. Membangun pabrik pupuk organik dari limbah hasil perkebunan untuk mengatasi kekurangan pupuk dan menuju pengembangan pertanian organik
  - q. Membangun pabrik pakan ternak unggas dengan menggunakan bahan baku yang tersedia secara local
  - r. Mendorong munculnya kelembagaan petani berupa poktan atau koperasi yang produktif dan aktif secara nyata

### 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera



Tujuan 3 TPB yaitu Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.4**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</b>											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Renstra Dinas Kesehatan	Angka	90.86	90.86	90.64	90.31	90	89.30	89.30	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 7: Angka Kematian Ibu (AKI)
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	94	94	94	94,5	95	95	95	Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Tana Tidung: Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	85	85,5	86	87	88	89	90	Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Tana Tidung: Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
		RPJMD Kab. Malinau	Persen	91,6	95	95	97	97	100	100	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	98,40	99,40	100	100	100	100	100	Indikator RPJMD Kab. Nunukan Bab 8: Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
<b>Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.</b>											
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Renstra Dinas Kesehatan	Angka	23,34	23,34	20,75	17,25	15,78	14,50	14,50	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 7: Angka kematian bayi (AKB)



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Renstra Dinas Kesehatan	Angka	23,34	23,34	20,75	17,25	15,78	14,50	14,50	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 7: Angka kematian bayi (AKB)
<b>Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</b>											
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Renstra Dinas Kesehatan	Persen	90	90	90	92	94	95	95	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 4 dan 7: Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Tana Tidung: Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
		RPJMD Kab. Malinau	Persen	20	50	50	50	50	50	50	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV
		RPJMD Kota Tarakan	orang	5231	5231	6677	6677	6677			
		Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan	Persen			0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan: Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	0,0090	0,0090	0,0090	0,0083	0,0076	0,0069	0,0062	Indikator BAB Kab. Nunukan 8 RPJMD: Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Renstra Dinas Kesehatan	Persen	94	94	94	96	98	100	100	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 4 dan 7: Persentase keberhasilan pengobatan TB
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	71,2	71,85	72,5	73	73,5	74	74,5	Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Tana Tidung: Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		RPJMD Kab. Malinau	Kasus	202	245	245	245	245	245	245	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
		RPJMD Kota Tarakan	orang	5536	5536	5835	5828	5822			
		Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan	Orang			231	211	190	190	190	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan: Insidensi TB (per 100.000 penduduk)
		Renstra Dinas Kesehatan Kab. Nunukan	Insidensi			190	190	190	190	190	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kab. Nunukan: Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Renstra Dinas Kesehatan	Persen	94	94	94	96	98	100	100	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 4 dan 7: Eliminasi Malaria
		RPJMD Kab. Malinau	Kasus	0	1	1	2	3	4	5	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka kejadian Malaria
		RPJMD Kab. Nunukan	Angka	1,51	1,45	1,40	1,35	1,29	1,24	1,19	Indikator BAB 8 RPJMD RPJMD Kab. Nunukan: Angka kejadian malaria
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Renstra Dinas Kesehatan	Persen	94	94	94	96	98	100	100	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 4 dan 7: Eliminasi Malaria
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.										
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.										
3.3.5 (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Renstra Dinas Kesehatan Kab. Nunukan	Prevalensi			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kab. Nunukan: Prevalensi Kusta (Per 10.000 Penduduk)
3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.										



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</b>												
3.4.1 (a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Renstra Dinas Kesehatan	Kab/Kota	5	5	5	5	5	5	5	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 6: Jumlah Kab/Kota >70% FKTP yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok	
		Renstra Dinas Kesehatan	Kab/Kota	5	5	5	5	5	5	5	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 6: Jumlah Kab/Kota yang melakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	
		RPJMD Kab. Malinau	Persen		25	25	25	25	25	25	25	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
		Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan	Persen			8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan: Persentase merokok penduduk usia 10-18 Tahun
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Tana Tidung: Prevalensi tekanan darah tinggi.	
		RPJMD Kab. Malinau	Persen		100	100	100	100	100	100	Indikator Renstra Dinkes PPKB Kab. Malinau: Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
		RPJMD Kota Tarakan	Orang	5577	10708	10708	10708	10708				
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Renstra Dinas Kesehatan	Kab/Kota			5	5	5	5	5	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 6: Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan	Persen			21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kab. Bulungan: Prevalensi Obesitas pada penduduk umur >18 Tahun
<b>Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.</b>											
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Renstra Dinas Kesehatan	Orang			200	280	330	450	480	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 6: Jumlah Orang penyalahguna NAPZA mendapatkan Pelayanan rehabilitasi medis
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.										
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.										
<b>Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</b>											
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB	Persen	67	56,97	57,32	57,68	58,13	58,70	59,00	Indikator Renstra Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB Bab 7: Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Renstra Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB	Indeks	2,9	2,2	2,17	2,15	2,12	2,1	2,08	Indikator Renstra Renstra Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB Bab 7: Total Fertility Rate (TFR).
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	Renstra Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB	Indeks	2,9	2,2	2,17	2,15	2,12	2,1	2,08	Indikator Renstra Renstra Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB Bab 7: Total Fertility Rate (TFR).
<b>Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</b>											
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Renstra Dinas Kesehatan	Angka	90,86	90,86	90,64	90,31	90	89,3	89,3	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 4 dan 7: Angka kematian ibu (AKI)
			Angka	23,34	23,34	20,75	17,25	15,78	14,5	14,5	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 4 dan 7:



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Persen	25	25	20	16	12	10	10	Angka kematian bayi (AKB) Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 4 dan 7: Persentase stunting
3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan										
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.										
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Renstra Dinas Kesehatan	Jiwa			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 6: Jumlah masyarakat yang tercover BPJS PBI Provinsi
<b>Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</b>											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Renstra Dinas Kesehatan	Kab/Kota	5	5	5	5	5	5	5	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 6: Jumlah Kab/Kota >70% FKTP yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok
		Renstra Dinas Kesehatan	Kab/Kota	5	5	5	5	5	5	5	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 6: Jumlah Kab/Kota yang melakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
		RPJMD Kab. Malinau	Persen		25	25	25	25	25	25	25
<b>Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kelestarian untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</b>											
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.										
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.										



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Renstra Dinas Kesehatan	Persen	90	n/a	92	94	96	96,50	97	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 6: Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial
<b>Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negaraberkembang pulau kecil.</b>											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Renstra Dinas Kesehatan	Orang			250	250	250	250	250	Indikator Renstra Dinas Kesehatan Bab 6: Jumlah SDM Kesehatan di wilayah DTPK yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan
<b>Target 3.d. Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.</b>											
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.										

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam mencapai target indikator TPB pada Tujuan 3, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Kesehatan
  - a. Peningkatan pelayanan penanganan/pemulihan kesehatan akibat COVID-19, dan kesehatan ibu hamil, pencegahan stunting dan penyakit menular lainnya.
  - b. Meningkatkan aksesibilitas layanan fasilitas kesehatan ibu dan anak.
  - c. Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi.
  - d. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi.
  - e. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.
  - f. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi.
  - g. Pengadaan Alat Kesehatan RS.
  - h. Pembangunan Gedung Bedah Central dan Jantung Terpadu serta Radioterapi.
  - i. Pengadaan SIMRS yang terintegrasi.
  - j. Menjadikan RSUD Tarakan Provinsi Kaltara Rumah Sakit Tipe A.
  - k. Pengadaan Kebutuhan Mesin Oksigen Generator untuk penanganan Covid -19.
  - l. Pengembangan Pelayanan dengan mengusulkan pengaduan Alat Cathlab dan Radioterapi.
  - m. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi (Dokter Spesialsi dan SubSpesialis).
  - n. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi.
  - o. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
  - p. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (ukot).
  - q. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi.
  - r. Pelaksanaan Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi.
  - s. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi.



2. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
  - a. Peningkatan partisipasi perempuan dan pemenuhan hak anak untuk terciptanya kesetaraan gender menuju kehidupan keluarga yang berkualitas.
  - b. Peningkatan partisipasi peran perempuan di bidang politik sosial dan ekonomi dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui instrumen kebijakan, pendampingan, pelayanan, pelebagaan dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi.
  - c. Peningkatan pemenuhan hak Anak melalui penguatan, pendampingan, pelayanan dan pemabngunan jaringan kelembagaan untuk meningkatnya kualitas hidup anak.
  - d. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyediaan layanan dengan penguatan dan pengembangan lembaga layanan.

#### 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas



Tujuan 4 TPB yaitu Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.5**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</b>											
4.1.1 (a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	RPJMD	Tahun	9,13	9,13	9,27	9,40	9,53	9,68	9,82	Indikator RPJMD Bab 8: Angka Rata-rata Lama Sekolah
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	87,20	87,40	87,60	88,00	88,50	89,00	90,00	Indikator RPJMD Kab. Tana Tidung Bab 8: Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	67,52	68,76	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	Indikator RPJMD Kab. Tana Tidung Bab 8: Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
		RPJMD Kab. Malinau	Orang	10000	10100	10120	10150	10300	10320	10350	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
		RPJMD Kab. Malinau	Orang	2477	4980	5480	5800	6240	6650	6900	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	98,68	98,68	98,77	98,86	98,95	99,04	99,12	Indikator RPJMD Kab. Nunukan Bab 8: Angka partisipasi sekolah SD/MI
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	95,39	95,87	96,35	96,83	97,31	97,80	98,29	Indikator RPJMD RPJMD Kab. Nunukan Bab 8: Angka partisipasi sekolah SMP/MTs
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	RPJMD	Persen	93,42	96,07	100	100	100	100	100	Indikator RPJMD Bab 8: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah
		RPJMD	Persen	93,06	n/a	100	100	100	100	100	Indikator RPJMD Bab 8: Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	87,20	87,40	87,60	88,00	88,50	89,00	90,00	Indikator RPJMD Kab. Tana Tidung Bab 8: Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	67,52	68,76	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	Indikator RPJMD Kab. Tana Tidung Bab 8: Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
		RPJMD Kab. Malinau	Persen	102,32	100	100	100	100	100	100	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka Kelulusan (AL) SD/MI
		RPJMD Kab. Malinau	Persen	102,34	100	100	100	100	100	100	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
		RPJMD Kota Tarakan	Persen	99,21	100	100	100	100			Indikator RPJMD Kota Tarakan: Angka kelulusan SD/MI
		RPJMD Kota Tarakan	Persen	100	100	100	100	100			Indikator RPJMD Kota Tarakan: Angka kelulusan SMP/MTs
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	98,99	99,00	99,25	99,50	99,75	100,00	100,00	Indikator BAB VIII RPJMD RPJMD Kab. Nunukan: Angka kelulusan SD/MI
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	99,01	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	99,70	Indikator BAB VIII RPJMD RPJMD Kab. Nunukan: Angka kelulusan SMP/MTs
4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Indikator RPJMD Kab. Tana Tidung Bab 7: Angka Putus Sekolah jenjang DIKDAS
		RPJMD Kab. Malinau	Persen	0,42	0,30	0,25	0,22	0,2	0,15	0,10	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
		RPJMD Kab. Malinau	Persen	2,43	2,02	1,12	1,01	0,90	0,75	0,63	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
		RPJMD Kota Tarakan	Persen	0,39	0,29	0,19	0	0			Angka putus sekolah SD/MI
		RPJMD Kota Tarakan	Persen	0,42	0,32	0,22	0,12	0,07			Angka putus sekolah SMP/MTs



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	20,26	20,20	20,10	20,00	19,80	19,60	19,40	Indikator BAB VIII RPJMD RPJMD Kab. Nunukan: Tidak tamat SD/Sederajat
<b>Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</b>											
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung	Persen		51,1	53,0	56,0	59,0	62,0	65,0	Indikator Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung: Angka Partisipasi Murni Jenjang PAUD (4-6 Tahun)
		RPJMD Kab. Malinau	Orang	1200	1500	1600	1650	1700	1740	1765	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	98,68	98,68	98,77	98,86	98,95	99,04	99,12	Indikator RPJMD Kab. Nunukan Bab 8: Angka partisipasi sekolah SD/MI
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	95,39	95,87	96,35	96,83	97,31	97,80	98,29	Indikator RPJMD RPJMD Kab. Nunukan Bab 8: Angka partisipasi sekolah SMP/MTs
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung	Persen		51,1	53,0	56,0	59,0	62,0	65,0	Indikator Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung: Angka Partisipasi Murni Jenjang PAUD (4-6 Tahun)
		RPJMD Kab. Malinau	Orang	1200	1500	1600	1650	1700	1740	1765	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	53,36	53,80	54,30	54,80	55,30	55,80	56,30	Angka partisipasi sekolah Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
<b>Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</b>											
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	RPJMD	point	0,91	-	0,94	0,95	0,97	0,98	1	Indikator RPJMD Bab 8: Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan : Laki
		RPJMD	Persen	1,5	-	1,51	1,52	1,53	1,55	1,6	Indikator RPJMD Bab 8: Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		RPJMD	Persen	40	-	45	50	55	60	65	Indikator RPJMD Bab 8: Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).										Bukan kewenangan pemerintah provinsi dan kab/kota
<b>Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.</b>											
4.4.1 (a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen		100	100	100	100	100	100	Indikator RPJMD Kab. Tana Tidung Bab 8: Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
		RPJMD Kab. Malinau	Persen	93,15	93,84	95,89	98,63	100	0	0	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 5: Persentase Sekolah Pengguna TIK
<b>Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</b>											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	94,19		100	100	100	100	100	Indikator Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bab 6: Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
		Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	66,22		100	100	100	100	100	Indikator Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bab 6: Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah
		Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	94,19		100	100	100	100	100	Indikator Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bab 6: Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus
		Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	100		100	100	100	100	100	Indikator Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bab 6: Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	58,8	61,5	64,2	66,9	69,6	72,3	75,0	RPJMD Kab. Tana Tidung Bab 8: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen		92,5	95,6	96,0	96,5	97,0	97,5	RPJMD Kab. Tana Tidung Bab 7: Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang DIKDAS
		Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung	Persen		78,8	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	Indikator Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung: Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Dasar (DIKDAS)



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		RPJMD Kab. Malinau	Orang	10000	10100	10120	10150	10300	10320	10350	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
		RPJMD Kab. Malinau	Orang	2477	4980	5480	5800	6240	6650	6900	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
		RPJMD Kab. Malinau	Orang	2240	3500	3850	4000	4300	4850	5140	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	90,81	91,81	92,81	93,81	94,81	95,81	96,81	Indikator BAB VIII RPJMD Kab. Nunukan: Angka Partisipasi Murni SD/MI
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	78,26	79,26	81,26	83,26	85,26	87,26	89,26	Indikator BAB VIII RPJMD Kab. Nunukan: Angka Partisipasi Murni SMP/MTs
<b>Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</b>											
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung	Persen		97,06	97,5	98	98,5	99	99,5	Indikator Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung: Angka Melek Huruf
		RPJMD Kab. Malinau	Orang	7762	8250	8300	8350	8400	8450	8500	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
		RPJMD Kota Tarakan	Orang		750	750	750	750			
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	94,68	94,88	95,00	95,25	95,50	95,70	95,90	Indikator BAB VIII RPJMD Kab. Nunukan: Angka Melek Huruf
<b>Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.</b>											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	n/a	76,24	83,8	91,35	98,91	100	100	Indikator Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bab 7: Persentase sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung	Persen		20	30,6	41,7	52,8	63,9	75,0	Indikator Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung: Persentase SD/SMP masuk dalam Sekolah Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		RPJMD Kab. Malinau	Persen		6	18	27	24	21	18	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 5: Rasio Ruang Kelas dalam Kondisi Baik



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		RPJMD Kab. Malinau	Persen	23,56	32,75	56,33	72,9	79,54	85,99	89,74	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 5: Persentase Ketersediaan Perlengkapan Sekolah (%)
4.a.1 (a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.										
<b>Target 4.b. Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.</b>											
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.										
<b>Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</b>											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	44,93	40,71	41,6	42,49	43,38	44,27	45,16	Indikator Renstra Dinas Pendidikan Bab 7: Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Professional
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen		70	74	79	84	90	97	Indikator RPJMD Kab. Tana Tidung Bab 7: Persentase tenaga pendidik Jenjang DIKDAS berkualifikasi S-1/D-IV
		RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen		15	20	25	29	39	50	Indikator RPJMD Kab. Tana Tidung Bab 7: Persentase tenaga pendidik PAUD berkualifikasi S-1/D-IV
		RPJMD Kab. Malinau	Orang		110	150	1525	1550	1575	1600	Indikator RPJMD Kab. Malinau Bab 8: Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
		RPJMD Kab. Bulungan	Persen		32,00	35,00	38,00	40,00	42,00	45,00	Indikator RPJMD Kab. Bulungan Bab 8: Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi minimal S1
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen		71,30	72,51	75,65	78,78	81,89	85,00	88,10

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam mencapai target indikator TPB pada Tujuan 4, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Pendidikan
  - a. Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
  - b. Membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta.
  - c. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan melalui pemberian perlengkapan dasar peserta didik dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah.
  - d. Memantapkan pengelolaan pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD dan kesetaraan/non formal.
  - e. Membina satuan pendidikan menengah untuk membuka pendidikan inklusif untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus.
  - f. Menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama.
  - g. Memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak, khususnya yang berada di wilayah pedalaman.
  - h. Mendukung pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat mendorong anak-anak yang tidak bersekolah untuk kembali mengikuti Pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.
  - i. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam peningkatan kualitas pembelajaran termasuk mengembangkan kurikulum pada SMK yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (*demand driven*); (2) Kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja.
  - j. Mengembangkan SMK menjadi *Centers of Excellence* guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di Kalimantan Utara.



- k. Optimalisasi Program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan SMA dan SLB melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) sekolah berupa program pelatihan dan pendampingan intensif serta pembelajaran dengan paradigma baru (berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter), perencanaan berbasis data, penggunaan berbagai platform digital yang bertujuan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi serta pendampingan program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah.
- l. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan satuan pendidikan terkait pemutakhiran database lulusan sehingga lulusan yang melanjutkan pendidikan, bekerja atau berwirausahaan dapat ditelusuri dan dibina untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- m. Memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah.
- n. Mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru.
- o. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dasar.
- p. Mengembangkan pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan profesionalitas dan motivasi dalam rangka meningkatkan karir serta penguatan kualitas layanan di satuan pendidikan.
- q. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian insentif dan honorarium untuk jenjang sekolah menengah dan SLB.
- r. Mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survey lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru.
- s. Membina satuan Pendidikan dalam rangka penerapan standar nasional Pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru.
- t. Melakukan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan professional



baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) untuk mendukung pembelajaran berkualitas.

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Peningkatan dan perluasan menciptakan peluang pekerjaan, dan pelaksanaan pelatihan serta pemagangan.
  - b. Peningkatan wawasan kepemudaan dan kepramukaan melalui sosialisasi, penyuluhan.
  - c. Peningkatan potensi, kapasitas, kreatifitas, daya saing, pengembangan tenaga terdidik pedesaan.
  - d. Penyusunan analisis potensi kepemudaan dan kependuan Provinsi Kaltara dengan melibatkan masyarakat dan unsur terkait.

### 3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender



Tujuan 5 TPB yaitu Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.6**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 5 Kesetaraan Gender**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</b>											
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Dokumen			2	1	1	1	1	Indikator Renstra DP3AP2KB Bab 6: Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG
<b>Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</b>											
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	RPJMD	rasio	9,61	n/a	9,00	7,50	6,20	6,00	5,50	Indikator RPJMD Bab 8: Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	RPJMD	rasio	9,61	n/a	9,00	7,50	6,20	6,00	5,50	Indikator RPJMD Bab 8: Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
<b>Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</b>											
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.										
<b>Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</b>											
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Renstra DP3AP2KB	Orang	35		35	40	40	45	45	Indikator Renstra DP3AP2KB Bab 6: Jumlah Kader Parpol/organisasi perempuan yang dibina



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Renstra DP3AP2KB	Orang	30		30	40	40	50	60	Indikator Renstra DP3AP2KB Bab 6:: Jumlah wirausaha perempuan yang dibina
<b>Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut.</b>											
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.										
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.										
<b>Target 5.a. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.</b>											
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.										
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.										
<b>Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</b>											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.										
<b>Target 5.c. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.</b>											
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Renstra DP3AP2KB	Persen	2,37		2,42	2,52	2,60	2,70	2,80	Indikator Renstra DP3AP2KB Bab 6:: Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam mencapai target indikator TPB pada Tujuan 5, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  - a. Peningkatan partisipasi perempuan dan pemenuhan hak anak untuk terciptanya kesetaraan gender menuju kehidupan keluarga yang berkualitas.
  - b. Peningkatan partisipasi peran perempuan dibidang politik sosial dan ekonomi dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui instrumen kebijakan, pendampingan, pelayanan, pelembagaan dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi.
  - c. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui penguatan, pendampingan, pelayanan dan pembangunan jaringan kelembagaan untuk meningkatnya kualitas hidup anak.
  - d. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyediaan layanan dengan penguatan dan pengembangan lembaga layanan.

### 3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak



Tujuan 6 TPB yaitu Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.7**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 6.1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</b>											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	81,73	84,78	87,82	90,86	93,91	96,95	100	Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Tana Tidung: rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
		RPJMD Kota Tarakan	Persen	74,05	74,38	92,34	95,62	95,96			RPJMD Kota Tarakan bab 7
		RPJMD Kab. Bulungan	Persen		75,00	77,14	79,38	81,53	83,29	84,54	Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Bulungan: Presentase jaringan air bersih yang kondisi baik dan berfungsi
		RPJMD Kab. Malinau	Persen	57	62	67	72	77	82	87	Indikator BAB 5 RPJMD Kab. Malinau: Presentase Penduduk Berakses Air Minum
		RPJMD Kab. Nunukan	Persen	56,1	56,1	63,73	64,92	66,11	67,3	68,5	Indikator RPJMD Kab. Nunukan: Presentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas SPAM kabupaten/kota
<b>Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</b>											
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	RPJMD Kab. Tana Tidung	Persen	85,43	87,14	88,85	90,24	91,46	92,53	93,46	Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Tana Tidung: Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
		RPJMD Kota Tarakan	Persen	74	74	81	88	95			RPJMD Kota Tarakan Bab 7, persentase rumah tangga yang teraliri jaringan air bersih
		RPJMD Kab. Bulungan	Persen		92,06	93,00	94,00	94,50	95,00	96,00	Indikator BAB 8 RPJMD Kab. Bulungan: persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak
		RPJMD Kab. Nunukan	Rasio	0	0	0	0	0	25	25	Indikator RPJMD Kab. Nunukan: Rasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 6.3: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</b>											
6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	1. RPJMD 2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Persen	55	0	62	70	78	86	94	Indikator Bab 7 RPJMD dan Renstra Bab 6 Dinas Lingkungan Hidup: Persentase limbah B3 yang terkelola
6.3.2 (a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	RPJMD	point	60.47	54.82	54.92	55.02	55.12	55.30	55.50	Indikator RPJMD Bab 8: Indeks Kualitas Air
6.3.2 (b)	Kualitas air tanah sebagai air baku										
<b>Target 6.4: Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.</b>											
6.4.2 (a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Renstra Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	2	2	4	2	0	0	0	Indikator Renstra Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab 6 dan 7: Jumlah unit air baku yang terbangun
6.4.2 (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	Renstra Dinas ESDM	Persen	21,7	23,65	33	51,52	68,18	84,85	100	Indikator Renstra Dinas ESDM Bab 4: Persentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang Diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan
<b>Target 6.5: Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.</b>											
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Renstra Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	2	2	4	2	0	0	0	Indikator Renstra Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab 6 dan 7: Jumlah unit air baku yang terbangun
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.										
<b>Target 6.6: Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.</b>											
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.										

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam mencapai target indikator TPB pada Tujuan 6, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Lingkungan Hidup
  - a. Meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor pengolahan limbah dan sampah.
  - b. Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut serta revegetasi lahan.
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.
  - d. Meningkatkan ketaatan usaha/masyarakat/lembaga dan/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Meningkatkan cakupan layanan air minum.
  - b. Mewujudkan pelayanan SPAM yang aman.
  - c. Penyediaan infrastruktur pendukung permukiman yang layak dan berkualitas, antara lain pemenuhan penyediaan air bersih dan sanitasi.
  - d. Meningkatkan sistem pengelolaan limbah.
3. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
  - a. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan kepada pengelola air tanah di wilayah Kalimantan Utara.
  - b. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

### 3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau



Tujuan 7 TPB yaitu Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.8**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</b>											
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	RPJMD	Persen	80.32	80.32	75.97	90.08	95.08	97.64	100	Indikator RPJMD Bab 8: Rasio elektrifikasi
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita.										
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.										
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.										
<b>Target 7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.</b>											
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	RPJMD	Persen	n/a	0	3.93	4.68	5.43	6.18	6.93	Indikator RPJMD Bab 8: Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Pembangkit (TOE/milyar rupiah)
<b>Target 7.3. Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</b>											
7.3.1*	Intensitas energi primer.	RPJMD	TOE/ Miliar Rupiah	0.05	0.09	0.13	0.19	0.27	0.38	0.27	Indikator RPJMD Bab 8: Nilai intensitas energi
<b>Target 7.b. Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang</b>											
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)										

Sumber: Hasil analisis, 2021



Dalam mencapai target indikator TPB pada Tujuan 7, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
  - a. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
  - b. Prioritas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT di daerah perbatasan, pedalaman dan terisolasi.
  - c. Membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dengan pemerintah pusat dan PT. PLN (Persero).
  - d. Pengembangan sumber energi terbarukan lainnya.

### 3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi



Tujuan 8 TPB yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.9**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</b>											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	RPJMD	ribu	8.756	8.845	8.483	8.234	7.985	7.736	7.487	Indikator RPJMD Bab 8: Pengeluaran per kapita
		RPJMD	Persen	-1.11	2,52 – 3,53	5,4	5,6	6,01	5,2	5,3	Indikator RPJMD Bab 8: Pertumbuhan Ekonomi
8.1.1 (a)	PDB per kapita.	RPJMD	ribu	8.756	8.845	8.483	8.234	7.985	7.736	7.487	Indikator RPJMD Bab 8: Pengeluaran per kapita
		RPJMD	Miliar Rp	60.743,20	62.887,43	66.283,36	69.995,22	74.201,94	78.060,44	82.197,64	Indikator RPJMD Bab 8: Nilai PDRB (ADHK)
		RPJMD	Miliar Rp	100.544,34	108.067,31	116.258,22	126.247,17	136.635,64	148.825,30	162.016,21	Indikator RPJMD Bab 8: Nilai PDRB (ADHE)
<b>Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.</b>											
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	RPJMD	Juta/Tenaga Kerja	183.82		183.77	187.74	191.71	195.68	199.65	Indikator RPJMD Bab 8: Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
<b>Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</b>											
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Renstra Disnakertrans	Lowongan Kerja			20,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Indikator pada Bab 6 Renstra Disnakertrans: Jumlah Lapangan Kerja Baru.
8.3.1 (a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	RPJMD	Persen	0.00	1.95	1.97	1.99	0,02	0,02	0,02	Indikator RPJMD Bab 8: Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR
		Renstra Dinas Perindagkop dan UKM	Persen	52,67	54,67	56,67	58,67	60,67	62,67	62,67	Indikator Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Bab 6: Persentase UMKM yang mengakses KUR
<b>Target 8.4. Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah</b>											
8.4.1 (a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan										



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</b>											
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Renstra Disnakertrans	Persen	31,16	30,45	34,78	38,40	42,02	45,64	49,26	Indikator Sasaran Renstra Disnakertrans (Bab IV): Persentase tenaga kerja yang memiliki upah/pendapatan minimal sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Baseline bersumber dari LKJIP Tahun 2020 dan Pengukuran Kinerja Triwulan III
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	RPJMD	Persen	4,97	4,8-5,5	4,56	4,45	4,33	4,22	4,11	Indikator RPJMD Bab 8: Tingkat Pengangguran Terbuka
8.5.2 (a)	Persentase setengah pengangguran	RPJMD	Persen	4,97	4,8-5,5	4,56	4,45	4,33	4,22	4,11	Indikator RPJMD Bab 8: Tingkat Pengangguran Terbuka
<b>Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.</b>											
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).										
<b>Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.</b>											
8.7.1 (a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
<b>Target 8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.</b>											
8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Renstra Disnakertrans	Perusahaan	10,01	Belum ada data	12,19	14,36	16,54	18,72	20,89	Indikator program pada Bab VI Renstra Disnakertrans yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan
<b>Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</b>											
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	RPJMD	Persen	2,28	2,28	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	Indikator RPJMD Bab 8: Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	RPJMD	orang	562,813	n/a	590,954	626,411	670,26	723,88	796,268	Indikator RPJMD Bab 8: jumlah kunjungan wisatawan
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	RPJMD	orang	562,813	n/a	590,954	626,411	670,26	723,88	796,268	Indikator RPJMD Bab 8: jumlah kunjungan wisatawan
8.9.1 (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.										
<b>Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.</b>											
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa										
8.10.1 (a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	RPJMD	Persen	0,00	1,95	1,97	1,99	0,02	0,02	0,02	Indikator RPJMD Bab 8: Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR
		Renstra Dinas Perindagkop dan UKM	Persen	52,67	n/a	54,67	56,67	58,67	60,67	62,67	Indikator Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Bab 6: Persentasi UMKM yang mengakses KUR
<b>Target 8.b. Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.</b>											
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.										

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam mencapai target indikator TPB pada Tujuan 8, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Tenaga Kerja
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan.
  - b. Memberikan pelatihan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
  - c. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja.
  - d. Memfasilitasi penyediaan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
  - e. Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
  - f. Mendukung penciptaan lapangan kerja baru.
  - g. Membangun database ketenagakerjaan.
  - h. Membangun koordinasi yang baik antara pusat, daerah dan lembaga swasta.
  - i. Memberi pemahaman kepada seluruh pihak terkait agar melakukan penentuan upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - j. Bersama dengan pemerintah daerah memberi pencerahan kepada perusahaan mengenai unsur kesejahteraan pekerja, yang tidak hanya didasarkan pada upah.
  - k. Mengoptimalkan pemeriksaan norma kerja dan K3 terhadap Perusahaan.
  - l. Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan terkait kepesertaan pekerja terhadap jaminan sosial.
  - m. Memberikan sosialisasi dan edukasi penerapan norma kerja dan K3.
  - n. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas ketenagakerjaan.
2. Urusan Pariwisata
  - a. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur obyek wisata.
  - b. Meningkatkan informasi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan dan teknologi digital.
  - c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pariwisata.
  - d. Mengembangkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing.
  - e. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing.



- f. Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi pada pelaku pariwisata dan ekraf.
  - g. Meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - h. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat untuk sadar wisata.
4. Urusan Ketahanan Pangan
- a. Melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan petani dalam pengembangan komoditas yang berorientasi pasar.
  - b. Melakukan kegiatan pendampingan poktan dan gapoktan dalam pengembangan komoditas yang prospektif dan memberikan keuntungan tertinggi per unit input yang digunakan.
  - c. Menjamin pemasaran produk komoditas pangan yang menguntungkan bagi petani, untuk menjamin peningkatan produksi menuju swasembada pangan.
  - d. Meningkatkan pemasaran produk hortikultura yang berkualitas tinggi keluar Provinsi Kalimantan Utara, antar daerah, antar pulau ataupun pasar internasional.
5. Urusan Pertanian
- a. Koordinasi dengan kabupaten/kota dapat berjalan dengan lancar dalam hal penetapan komoditas unggulan daerah dan lokus kegiatan.
  - b. PPL mempunyai wawasan yang luas dan keterampilan yang tinggi dalam membimbing dan mendampingi petani berproduksi dan mengelola kegiatan usaha pertaniannya.
  - c. Petani dapat mengelola kegiatan pertaniannya dari pendekatan tradisional subsisten menjadi berpendekatan komersial dan berorientasi pasar.
  - d. Kapasitas peringkat kelompok tani meningkat.
  - e. Meningkatkan kualitas kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dalam kegiatan produksi dan pengelolaan usaha tani.
  - f. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas padi dan palawija.
  - g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditas hortikultura.
  - h. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan.
  - i. Meningkatkan populasi dan kesehatan ternak.
  - j. Mengembangkan sistem pertanian terpadu berdasarkan analisis sumber daya loka yang tersedia.



- k. Tersusun regulasi tentang “meningkatkan efektivitas penggunaan SDA sebagai sumber daya utama pembangunan pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB.
  - l. Kegiatan pertanian rakyat berjalan secara sinergis dan bersimbiosis mutualisme dengan perusahaan pertanian yang berkegiatan di Provinsi Kalimantan Utara.
  - m. Perusahaan pertanian yang berkembang di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kontribusi yang nyata terhadap peningkatan PDRB dari sektor pertanian.
  - n. Mengembangkan integrasi sapi-sawit, atau sapi-padi dengan sistem kandang komunal.
  - o. Membangun pabrik pupuk organik dari limbah hasil perkebunan untuk mengatasi kekurangan pupuk dan menuju pengembangan pertanian organik.
  - p. Membangun pabrik pakan ternak unggas dengan menggunakan bahan baku yang tersedia secara lokal.
  - q. Mendorong munculnya kelembagaan petani berupa poktan atau koperasi yang produktif dan aktif secara nyata.
6. Urusan Kelautan dan Perikanan
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan budidaya.
  - b. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat terhadap produksi perikanan budidaya.
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan tangkap.
  - d. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat terhadap produksi perikanan tangkap.
  - e. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat terhadap ragam olahan hasil perikanan.
  - f. Meningkatkan hari operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
  - g. Meningkatkan kontribusi kelompok masyarakat (POKMASWAS) terhadap pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
  - h. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - i. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.



3. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  - a. Memperkuat permodalan.
7. Urusan Perdagangan
  - a. Mengoptimalkan pembangunan jaringan infrastruktur dengan baik dan merata.
  - b. Mempertahankan subsidi ongkos angkut barang.
  - c. Memantau pelaksanaan distribusi barang.
  - d. Melakukan pengawasan barang beredar yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
  - e. Meningkatkan dalam pemberian informasi ke masyarakat terkait perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen.
  - f. Melaksanakan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.
  - g. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur ekspor dan impor.
  - h. Melakukan pelatihan kepada pelaku ekspor agar dapat memenuhi standar ekspor.
  - i. Meningkatkan promosi dan kualitas produk unggulan Kalimantan Utara yang masih kurang dikenal di pasar internasional.
8. Urusan Perindustrian
  - a. Mengoptimalkan penyusunan RPIK di kabupaten/kota.
  - b. Memanfaatkan sarana industri yang terbangun.
  - c. Mengoptimalkan sinkronisasi antara organisasi/lembaga/ masyarakat dalam mendukung program pengembangan industri.
  - d. Meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap proses penerbitan izin industri.
  - e. Mengoptimalkan informasi terkait industri di Kalimantan Utara.

### 3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur



Tujuan 9 TPB yaitu Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.10**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</b>												
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.											
9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional.											Kewenangan pemerintah pusat
9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol.											
9.1.1 (c)	Panjang jalur kereta api.											
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.											
9.1.2 (a)	Jumlah bandara.											Kewenangan pemerintah pusat
9.1.2 (b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Renstra Dinas Perhubungan	pelabuhan	2	2	2	2	2	2	2		Indikator Renstra Dinas Perhubungan Bab 6: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.											
<b>Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</b>												
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Renstra Dinas Perindag dan UKM	Persen	9,15	9,17	9,20	9,23	9,28	9,33	9,37		Indikator Renstra Dinas Perindag dan UKM Bab 4: Persentase kontribusi sektro industri terhadap PDRB
9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	RPJMD	Persen	-3,85	7,18	7,2	6,73	6,32	7,37	6,86		Indikator RPJMD Bab 8: Laju pertumbuhan PDRB sektor industri
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.											
<b>Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.</b>												
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.											



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.											
<b>Target 9.4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</b>												
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.											
9.4.1 (a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.											
9.4.1 (b)	Intensitas emisi sektor industri.											
<b>Target 9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.</b>												
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.											
9.5.2 (a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).											
<b>Target 9.b. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.</b>												
9.b.1 (a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi											
<b>Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.</b>												
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.											

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam mencapai target indikator TPB pada Tujuan 9, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Perhubungan
  - a. Menetapkan rencana induk jaringan LLAJ provinsi.
  - b. Meningkatkan jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi.
  - c. Meningkatkan kualitas layanan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP).
  - d. Optimalisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRL) untuk jaringan jalan provinsi.
  - e. Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) untuk jalan provinsi.
  - f. Meningkatkan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.
  - g. Meningkatkan kualitas layanan perizinan bidang pelayaran.
  - h. Meningkatkan kualitas perizinan/pembangunan/pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai/danau.
  - i. Menetapkan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan.
2. Urusan Perindustrian
  - a. Memanfaatkan sarana industri yang terbangun.
  - b. Mengoptimalkan sinkronisasi antara organisasi/lembaga/ masyarakat dalam mendukung program pengembangan industri.
  - c. Meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap proses penerbitan izin industri.
  - d. Mengoptimalkan informasi terkait industri di Provinsi Kalimantan Utara.

### 3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan



Tujuan 10 TPB yaitu Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.11**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</b>												
10.1.1*	Rasio Gini.	RPJMD	Poin		0.29	0.284	0.283	0.282	0.281	0.280	Indikator RPJMD Bab 8: Indeks Gini	
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	RPJMD	Persen	7,0-6,8	7,0-6,8	7,0-6,73	6,7-6,0	6,1-5,9	5,8-5,7	5,6-5,2	Indikator RPJMD Bab 8: Angka Kemiskinan	
10.1.1 (b)	Jumlah desa tertinggal.	RPJMD	Desa	234	n.a	182	162	140	116	90	Indikator RPJMD Bab 8: Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	
10.1.1 (c)	Jumlah Desa Mandiri.	RPJMD	Desa	19	n.a	34	37	40	43	46	Indikator RPJMD Bab 8: Jumlah desa mandiri	
10.1.1 (d)	Jumlah daerah tertinggal.	RPJMD	Desa	234	n.a	182	162	140	116	90	Indikator RPJMD Bab 8: Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	
10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.											
10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.											
<b>Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.</b>												
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.											
<b>Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.</b>												
10.3.1 (a)	Indeks Kebebasan.	RPJMD	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Indikator RPJMD Bab 8: Indeks Demokrasi Indonesia	
10.3.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Renstra DP3AP2KB		49,2		49,00	47,00	45,00	43,00	41,00	Indikator Renstra DP3AP2KB Bab 6: Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										
<b>Target 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</b>											
10.4.1 (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.										
10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Renstra Disnakertrans	Persen	31,16	30,45	34,78	38,40	42,02	45,64	49,26	Indikator Sasaran di Bsb IV Renstra Disnakertrans yaitu Persentase tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan Baseline bersumber dari LKJIP Tahun 2020 dan Pengukuran Kinerja Triwulan III
<b>Target 10.5. Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya</b>											
10.5.1 (a)	Indikator Kesehatan Perbankan.										
<b>Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.</b>											
10.7.2 (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.										
10.7.2 (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi. Indikator nasional sebagai proksi indikator										

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam mencapai target indikator TPB pada Tujuan 10, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Perindustrian
  - a. Memanfaatkan sarana industri yang terbangun.
  - b. Mengoptimalkan sinkronisasi antara organisasi/lembaga/ masyarakat dalam mendukung program pengembangan industri.
  - c. Meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap proses penerbitan izin industri.
  - d. Mengoptimalkan informasi terkait industri di Provinsi Kalimantan Utara.
2. Urusan Kelautan dan Perikanan
  - a. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan budidaya.
  - b. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat terhadap produksi perikanan budidaya.
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan tangkap.
  - d. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat terhadap produksi perikanan tangkap.
  - e. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat terhadap ragam olahan hasil perikanan.
  - f. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - g. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Urusan Pariwisata
  - a. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur obyek wisata.
  - b. Meningkatkan informasi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan dan teknologi digital.
  - c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pariwisata.
  - d. Mengembangkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing.
  - e. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing.
  - f. Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi pada pelaku pariwisata dan ekraf.



- g. Meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
- h. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat untuk sadar wisata.
- 4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
  - b. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.
  - c. Fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga.
  - d. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
  - e. Pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUM Desa kabupaten/kota dan lembaga kerjasama antar desa.
  - f. Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.
  - g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
  - h. Fasilitasi kabupaten/kota dan desa dalam penataan desa.
  - i. Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintah desa.
  - j. Fasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang mengatur desa.
  - k. Pembinaan manajemen pemerintahan desa.
  - l. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa.
  - m. Fasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
  - n. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
  - o. Fasilitasi pengelolaan aset desa.
  - p. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan.
  - q. Pelaksanaan profil desa dan kelurahan.
  - r. Pembinaan aparatur pemerintah desa.
  - s. Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD.
  - t. Pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis.
  - u. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.
  - v. Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa.



- w. Fasilitasi pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa di kabupaten/kota.
  - x. Fasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Urusan Sosial
- a. Difokuskan pada kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar PPKS terlantar didalam panti milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Panti milik masyarakat dan diarahkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar PPKS terlantar didalam panti dan presentase keberfungsian sosial PPKS di dalam panti.
  - b. Difokuskan pada kegiatan jaminan sosial bagi PPKS non produktif dan penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana provinsi dan diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap korban bencana provinsi dan penyelenggaraan jaminan sosial PPKS non Produktif.
  - c. Difokuskan pada kegiatan penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan diarahkan pada peningkatan peran PSKS dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.
  - d. Difokuskan pada kegiatan penanganan bencana alam dan sosial untuk meningkatkan kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya.
  - e. Difokuskan pada kegiatan bimbingan sosial dan motivasional terhadap keluarga fakir miskin dan pengelolaan data kemiskinan dan PPKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi.
6. Urusan Tenaga Kerja
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan.
  - b. Memberikan pelatihan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
  - c. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja.
  - d. Memfasilitasi penyediaan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
  - e. Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
  - f. Mendukung penciptaan lapangan kerja baru.
  - g. Membangun database ketenagakerjaan.
  - h. Membangun koordinasi yang baik antara pusat, daerah dan lembaga swasta.



- i. Mengoptimalkan pemeriksaan norma kerja dan K3 terhadap perusahaan.
  - j. Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan terkait kepesertaan pekerja terhadap jaminan sosial.
  - k. Memberikan sosialisasi dan edukasi penerapan norma kerja dan K3.
  - l. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas ketenagakerjaan.
7. Urusan Ketahanan Pangan
- a. Melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan petani dalam pengembangan komoditas yang berorientasi pasar.
  - b. Melakukan kegiatan pendampingan poktan dan gapoktan dalam pengembangan komoditas yang prospektif dan memberikan keuntungan tertinggi per unit input yang digunakan.
8. Urusan Kehutanan
- a. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada pemegang izin usaha kehutanan.
  - b. Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi masyarakat dengan pemegang izin.
  - c. Melakukan penataan batas sesuai kewenangannya.
  - d. Melakukan koordinasi dalam rangka pemantapan Kawasan hutan.
  - e. Melakukan survey biogeofisik dan sosial ekonomi masyarakat.
  - f. Percepatan penyusunan dokumen RPHJP.
  - g. Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan ekspose penilaian dokumen RPHJP kepada para pihak dan tim penilai.
  - h. Melakukan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi dan pemberdayaan kepada masyarakat.
  - i. Melakukan peningkatan SDM aparatur dan masyarakat.
  - j. Memberikan bantuan sarana prasarana peningkatan ekonomi produktif kepada KUPS.
  - k. Mengembangkan perhutanan sosial berbasis hasil hutan non kayu.
  - l. Melakukan Koordinasi kepada instansi terkait Peraturan dan
  - m. kebijakan yang kurang implementatif.
  - n. Melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat.
  - o. Membentuk masyarakat peduli api.
  - p. Peningkatan pemenuhan Saprasi penanggulangan karhutla.
  - q. Peningkatan kompetensi masyarakat peduli api dan pemegang izin.



- r. Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
  - s. Melakukan patrol pengamanan hutan secara berkala.
  - t. Melakukan Pendidikan dan Latihan dasar polhut dan PPNS.
  - u. Melakukan koordinasi pihak berwajib terkait penanggulangan illegal logging.
  - v. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial.
  - w. Melakukan penghijauan, rehabilitasi, reklamasi, dan reboisasi serta pengelolaan DAS sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air.
  - x. Melakukan pembinaan kepada pemegang izin yang punya kewajiban melakukan rehabilitasi dan reklamasi khususnya pemegang IPPKH.
  - y. Melakukan optimalisasi pengelolaan persemaian dalam rangka penyediaan bibit tanaman.
  - z. Melakukan updating data lahan kritis di Provinsi Kalimantan Utara.
  - aa. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terkait pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan.
  - bb. Meningkatkan sarana prasarana dalam rangka kelola lingkungan.
  - cc. Peningkatan penerbitan pertimbangan teknis untuk perijinan berusaha pengolahan hasil hutan kayu skala kecil, menengah dan besar.
  - dd. Mewajibkan kepada pemegang perijinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk menyediakan 5% produksi kayu bulat untuk pemenuhan industri kayu skala kecil dan menengah.
  - ee. Meningkatkan optimalisasi pemanenan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh pemegang berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu melalui pengendalian dan pengawasan.
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- a. Peningkatan partisipasi perempuan dan pemenuhan hak anak untuk terciptanya kesetaraan gender menuju kehidupan keluarga yang berkualitas.
  - b. Peningkatan partisipasi peran perempuan dibidang politik sosial dan ekonomi dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui instrumen kebijakan, pendampingan, pelayanan, pelembagaan dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi.



- c. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui penguatan, pendampingan, pelayanan dan pembangunan jaringan kelembagaan untuk meningkatnya kualitas hidup anak.
  - d. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyediaan layanan dengan penguatan dan pengembangan lembaga layanan.
10. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Mewujudkan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.
  - b. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) cakupan daerah provinsi.
  - c. Mewujudkan kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi.
11. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- a. Mengoptimalkan penyuluhan/sosialisasi tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan berbagai forum dan ormas;
  - b. Mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta ormas keagamaan lainnya;
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.

### 3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan



Tujuan 11 TPB yaitu Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



Tabel 3.12

**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh</b>											
11.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	1. RPJMD 2. Renstra Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen			20	20	20	20	20	Indikator Bab 7 RPJMD dan Bab 6 Renstra Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman: Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi atau warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
<b>Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.</b>											
11.2.1 (a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik										
11.2.1 (b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Bab 6 dan 8 RPJMD Dinas Perhubungan	Persen	55	55	55	65	80	82	85	RPJMD Bab 6 dan 8: Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan
<b>Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.</b>											
11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk										
<b>Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia</b>											
11.4.1 (a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	50	50	53	56	59	62	65	Indikator Bab 4 Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Persentase warisan budaya yang ditetapkan nasional
<b>Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</b>											



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	RPJMD BAB 7	KPM (kelompok penerima manfaat)	75		100	100	125	130	135	Indikator Bab 7 RPJMD: Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani
		Renstra BPBD	Persen			100	100	100	100	100	Indikator Bab 4 Renstra BPBD: Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca bencana Provinsi
11.5.2 (a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB										
<b>Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota</b>											
11.6.1 (a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	1. RPJMD 2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Persen	60		68	76	84	92	100	Indikator Bab 7 RPJMD dan Renstra Bab 6 Dinas Lingkungan Hidup: Persentase Sampah yang dikelola
11.6.1 (b)	Persentase sampah nasional yang terkelola										Kewenangan pemerintah pusat
11.6.2 (a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10										
11.6.2 (b)	Indeks Kualitas Udara	1. RPJMD 2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Poin	94,23	91,21	91,32	91,43	91,54	92	92,15	Indikator Bab 5 dan 8 RPJMD dan Renstra Bab 4 dan 6 Dinas Lingkungan Hidup: Indeks Kualitas Udara (IKU)
<b>Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas</b>											
11.7.1 (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Renstra Dinas Lingkungan	Lokasi				1	1	1	1	Renstra Bab 6 Dinas Lingkungan: Jumlah Lokasi Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan
11.7.2 (a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir										
<b>Target 11.a. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah</b>											
11.a.1 (a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS										
<b>Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</b>											



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030											
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	RPJMD	Persen	10	20	30	50	65	80	100	Indikator RPJMD Bab 8: Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	
		RPJMD	Persen	20	30	30	40	50	60	70	Indikator RPJMD Bab 8: Persentase penanganan pra bencana	
		RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Indikator RPJMD Bab 8: Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
<b>Target 11.c. Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal</b>												
11.c.1 (a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam rangka mencapai target indikator TPB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - a. Mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi.
  - b. Mewujudkan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi.
  - c. Mewujudkan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi.
  - d. Mewujudkan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
  - e. Mewujudkan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
  - f. Menyenggarakan urusan PSU permukiman.
  - g. Penyediaan infrastruktur pendukung permukiman yang layak dan berkualitas, antara lain pemenuhan penyediaan air bersih dan sanitasi.
2. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Mewujudkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
3. Urusan Perhubungan  
Meningkatkan kualitas layanan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP).
4. Urusan Kebudayaan
  - a. Mengoptimalkan pembangunan kebudayaan melalui revitalisasi fasilitas dan infrastruktur kebudayaan agar dapat dimanfaatkan dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
  - b. Melaksanakan pemetaan warisan budaya (benda dan tak benda) yang ada di Kalimantan Utara guna pemutakhiran database warisan budaya dalam rangka penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter.
  - c. Menguatkan kapasitas SDM seni dan budaya baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sehingga pelestarian dan pengembangan kebudayaan dapat terlaksana dengan baik.



5. Urusan Sosial

Difokuskan pada kegiatan jaminan sosial bagi PPKS non produktif dan penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana provinsi dan diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap korban bencana provinsi dan penyelenggaraan jaminan sosial PPKS non Produktif.

6. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- a. Menyediakan kajian resiko bencana.
- b. Mengoptimalkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana provinsi (per jenis bencana).
- c. Menyediakan rencana penanggulangan bencana.
- d. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.
- e. Mengoptimalkan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana.
- f. Menyediakan pengelolaan risiko bencana dan rencana kontijensi.
- g. Menyediakan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
- h. Membuat regulasi penanggulangan bencana daerah.
- i. Memperkuat kelembagaan bencana daerah dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.
- j. Menyediakan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan.

7. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor pengolahan limbah dan sampah.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penurunan emisi GRK.
- c. Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut serta revegetasi lahan.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.
- e. Meningkatkan ketaatan usaha/masyarakat/lembaga dan/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.



### 3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab



Tujuan 12 TPB yaitu Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.13**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Target 12.1. Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang</b>												
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
<b>Target 12.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen</b>												
12.3.1 (a)	Persentase sisa makanan											
<b>Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan</b>												
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.	1. RPJMD 2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Persen	55		62	70	78	86	94	Indikator Bab 7 RPJMD dan Renstra Bab 6 Dinas Lingkungan Hidup: Persentase limbah B3 yang terkelola	
12.4.1 (a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri											
12.4.1 (b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	RPJMD	Ton CO2-eq	5.006.209		5.268.945	6.523.255	7.774.605	9.018.675	10.252.006	Indikator Bab 5 dan 8 RPJMD: Tingkat penurunan emisi GRK	
12.4.2*	Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya	1. RPJMD 2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Persen	55		62	70	78	86	94	Indikator Bab 7 RPJMD dan Renstra Bab 6 Dinas Lingkungan Hidup: Persentase limbah B3 yang terkelola	
<b>Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali</b>												
12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1. RPJMD 2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Persen	60		68	76	84	92	100	Indikator Bab 7 RPJMD dan Renstra Bab 6 Dinas Lingkungan Hidup: Persentase Sampah yang dikelola	
<b>Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka</b>												
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya											
12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.											



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 12.7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional</b>											
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi	Renstra Sekretariat Daerah	Persen			100	100	100	100	100	Indikator Bab 6 Renstra Sekretariat Daerah: Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah										
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa										
<b>Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam</b>											
12.8.1 (a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1. RPJMD Bab 8 2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Persen	5		5	5	5	5	5	Indikator Bab 8 RPJMD dan Bab 6 Renstra Dinas Lingkungan Hidup: Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
12.8.1 (b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister										
<b>Target 12.a. Mendukung negaranegara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan</b>											
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)										
<b>Target 12.b. Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal</b>											
12.b.1 (a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development										
<b>Target 12.c. Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak</b>											
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.										

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam rangka mencapai target indikator TPB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Lingkungan Hidup
  - a. Meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor pengolahan limbah dan sampah.
  - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penurunan emisi GRK.
  - c. Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut serta revegetasi lahan.
  - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.
  - e. Meningkatkan ketaatan usaha/masyarakat/lembaga dan/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Sekretariat Daerah
  - a. Optimalisasi Capaian Perjanjian Kinerja PD

### 3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim



Tujuan 13 TPB yaitu Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.14**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam disemua negara</b>											
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	1. RPJMD 2. Renstra Dinas Sosial Renstra BPBD	KPM (kelompok penerima manfaat) Persen	75		100	100	125	130	135	Indikator Bab 7 RPJMD dan Bab 6 Renstra Dinas Sosial yaitu: Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani  Indikator Bab 4 Renstra BPBD: Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca bencana Provinsi
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030										
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	RPJMD	Persen	10	20	30	50	65	80	100	Indikator RPJMD Bab 8: Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
		RPJMD	Persen	20	30	30	40	50	60	70	Indikator RPJMD Bab 8: Persentase penanganan pra bencana
		RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Indikator RPJMD Bab 8: Persentase penanganan tanggap darurat bencana
<b>Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional</b>											
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Laporan			2	2	2	2	2	Indikator Bab 6 Renstra Dinas Lingkungan Hidup: Jumlah Laporan Inventarisasi, Mitigasi dan Adaptasi GRK
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	RPJMD	Ton CO2-eq	5.006.209		5.268.945	6.523.255	7.774.605	9.018.675	10.252.006	Indikator Bab 5 dan 8 RPJMD: Tingkat penurunan emisi GRK



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Laporan			2	2	2	2	2	Indikator Bab 6 Renstra Dinas Lingkungan Hidup: Jumlah Laporan Inventarisasi, Mitigasi dan Adaptasi GRK
13.2.2 (a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	RPJMD	Ton CO2-eq	5.006.209		5.268.945	6.523.255	7.774.605	9.018.675	10.252.006	Indikator Bab 5 dan 8 RPJMD: Tingkat penurunan emisi GRK
		Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Laporan			2	2	2	2	2	Indikator Bab 6 Renstra Dinas Lingkungan Hidup: Jumlah Laporan Inventarisasi, Mitigasi dan Adaptasi GRK
13.2.2 (b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	RPJMD	Ton CO2-eq	5.006.209		5.268.945	6.523.255	7.774.605	9.018.675	10.252.006	Indikator Bab 5 dan 8 RPJMD: Tingkat penurunan emisi GRK
		Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Laporan			2	2	2	2	2	Indikator Bab 6 Renstra Dinas Lingkungan Hidup: Jumlah Laporan Inventarisasi, Mitigasi dan Adaptasi GRK
<b>Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim</b>											
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1. RPJMD 2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Persen	5		5	5	5	5	5	Indikator Bab 8 RPJMD dan Bab 6 Renstra Dinas Lingkungan Hidup: Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
<b>Target 13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin</b>											
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim										

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam rangka mencapai target indikator TPB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Sosial

Difokuskan pada kegiatan jaminan sosial bagi PPKS non produktif dan penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana provinsi dan diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap korban bencana provinsi dan penyelenggaraan jaminan sosial PPKS non Produktif.

2. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- a. Menyediakan kajian resiko bencana.
- b. Mengoptimalkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana provinsi (per jenis bencana).
- c. Menyediakan rencana penanggulangan bencana.
- d. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.
- e. Mengoptimalkan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana.
- f. Menyediakan pengelolaan risiko bencana dan rencana kontijensi.
- g. Menyediakan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
- h. Membuat regulasi penanggulangan bencana daerah.
- i. Memperkuat kelembagaan bencana daerah dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.
- j. Menyediakan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan.

3. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor pengolahan limbah dan sampah.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penurunan emisi GRK.
- c. Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut serta revegetasi lahan.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.
- e. Meningkatkan ketaatan usaha/masyarakat/lembaga dan/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4. Urusan Kehutanan



- a. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada pemegang izin usaha kehutanan.
- b. Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi masyarakat dengan pemegang izin.
- c. Melakukan penataan batas sesuai kewenangannya.
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka pemantapan Kawasan hutan.
- e. Melakukan survey biogeofisik dan sosial ekonomi masyarakat.
- f. Percepatan penyusunan dokumen RPHJP.
- g. Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan ekspose penilaian dokumen RPHJP kepada para pihak dan tim penilai.
- h. Melakukan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi dan pemberdayaan kepada masyarakat.
- i. Melakukan peningkatan SDM aparatur dan masyarakat.
- j. Memberikan bantuan sarana prasarana peningkatan ekonomi produktif kepada KUPS.
- k. Mengembangkan perhutanan sosial berbasis hasil hutan non kayu.
- l. Melakukan Koordinasi kepada instansi terkait Peraturan dan kebijakan yang kurang implementatif.
- m. Melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat.
- n. Membentuk masyarakat peduli api.
- o. Peningkatan pemenuhan Saprass penanggulangan karhutla.
- p. Peningkatan kompetensi masyarakat peduli api dan pemegang izin.
- q. Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- r. Melakukan patrol pengamanan hutan secara berkala.
- s. Melakukan Pendidikan dan Latihan dasar polhut dan PPNS.
- t. Melakukan koordinasi pihak berwajib terkait penanggulangan illegal logging.
- u. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial.
- v. Melakukan penghijauan, rehabilitasi, reklamasi, dan reboisasi serta pengelolaan DAS sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air.
- w. Melakukan pembinaan kepada pemegang izin yang punya kewajiban melakukan rehabilitasi dan reklamasi khususnya pemegang IPPKH.
- x. Melakukan optimalisasi pengelolaan persemaian dalam rangka penyediaan bibit tanaman.
- y. Melakukan updating data lahan kritis di Provinsi Kalimantan Utara.



- aa. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terkait pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan.
- bb. Meningkatkan sarana prasarana dalam rangka kelola lingkungan.
- cc. Peningkatan penerbitan pertimbangan teknis untuk perijinan berusaha pengolahan hasil hutan kayu skala kecil, menengah dan besar.
- dd. Mewajibkan kepada pemegang perijinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk menyediakan 5% produksi kayu bulat untuk pemenuhan industri kayu skala kecil dan menengah.
- ee. Meningkatkan optimalisasi pemanenan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh pemegang berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu melalui pengendalian dan pengawasan.

### 3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan



Tujuan 14 TPB yaitu Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.15**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 14 Ekosistem Lautan**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Target 14.1. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi</b>												
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut											
<b>Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif</b>												
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	- RPJMD - Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	41,37		50,88	69,34	78,85	88,36	97,87	Indikator Bab 8 RPJMD dan Bab 4 & 7 Renstra DKP: Persentase Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku	
		Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	86,74		3	3	3	3	3	Indikator Bab 6 & 7 Renstra DKP (UPT Konservasi & Pengawasan): Persentase Peningkatan Pola Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola	
		Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	Kawasan	2		3	3	3	5	5	Indikator Bab 6 & 7 Renstra DKP: Jumlah kawsan ruang laut yang dikelola	
		Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	41,37		50,88	69,34	78,85	88,36	97,87	Indikator Bab 7 RPJMD (UPT Konservasi & Pengawasan): Persentase luas pengelolaan ruang laut yang dikelola	
		Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	Ha	285.941,00		351.672,13	479.263,87	377.899,56	333.912,05	676.457,39	Indikator Bab 6 & 7 Renstra DKP: Luas wilayah perairan sampai dengan 12 mil yang dikelola	
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan											
<b>Target 14.4. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya</b>												
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman	Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	Ton	25.804		33.326	34.411	35.381	36.259	37.061	Indikator Bab 7 RPJMD: Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia</b>											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	Ha	25.536		25.536	30.740,77	31.116,29	34.227,92	37.650,71	Indikator Bab 6 & 7 Renstra DKP: Jumlah luas kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola
<b>Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan &amp; tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang &amp; negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)</b>											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	50,30	51,41	51,97	52,55	53,12	53,71	53,71	Indikator Bab 4 Renstra DKP: Persentase kepatuhan pelaku usaha
<b>Target 14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar</b>											
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil										
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan										
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi										
<b>Target 14.c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want"</b>											
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)										

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam rangka mencapai target indikator TPB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
  - a. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Produksi Perikanan Budidaya.
  - b. Meningkatkan Kontribusi Kelompok/Masyarakat Terhadap Produksi Perikanan Budidaya.
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan tangkap.
  - d. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat terhadap produksi perikanan tangkap.
  - e. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat terhadap ragam olahan hasil perikanan.
  - f. Meningkatkan kontribusi kelompok masyarakat (POKMASWAS) terhadap pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
  - g. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - h. Meningkatkan kontribusi kelompok/masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

### 3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan



Tujuan 15 TPB yaitu Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.16**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 15 Ekosistem Daratan**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</b>											
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Renstra Dinas Kehutanan	Ha	5.866.493	5.871.302	5.875.667	5.879.901	5.884.281	5.887.593	5.890.823	Indikator di Bab 4 Renstra Dinas Kehutanan: Peningkatan Luas Tutupan Lahan Hutan
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Renstra Dinas Kehutanan	Kawasan	1		1	1	1	1	1	Indikator di Bab 6 Renstra Dinas Kehutanan: Jumlah Kawasan ekosistem penting yang dikelola / yang dijaga
<b>Target 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.</b>											
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju										
<b>Target 15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi</b>											
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Renstra Dinas Kehutanan	Ha	150.281	145.472	141.107	136.873	132.493	129.181	125.951	Indikator di Bab 4 Renstra Dinas Kehutanan: Luas Lahan Kritis
<b>Target 15.4. Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan</b>											
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	- RPJMD - Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Persen	5		10	23	25	27	30	Indikator Bab 7 RPJMD dan Bab 6 Renstra Dinas Lingkungan Hidup: Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan										
<b>Target 15.5. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah</b>											
15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)										
<b>Target 15.6. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional</b>											
15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata										



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Target 15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal</b>												
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
<b>Target 15.8. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas</b>												
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)											
<b>Target 15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan</b>												
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis											
<b>Target 15.a. Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan</b>												
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	- RPJMD - Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Persen	5		10	23	25	27	30	Indikator Bab 7 RPJMD dan Bab 6 Renstra Dinas Lingkungan Hidup: Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
<b>Target 15.b. Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi</b>												
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	- RPJMD - Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Persen	5		10	23	25	27	30	Indikator Bab 7 RPJMD dan Bab 6 Renstra Dinas Lingkungan Hidup: Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
<b>Target 15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan</b>												
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam rangka mencapai target indikator TPB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Urusan Kehutanan
  - a. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada pemegang izin usaha kehutanan.
  - b. Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi masyarakat dengan pemegang izin.
  - c. Melakukan penataan batas sesuai kewenangannya.
  - d. Melakukan koordinasi dalam rangka pemantapan Kawasan hutan.
  - e. Melakukan survey biogeofisik dan sosial ekonomi masyarakat.
  - f. Percepatan penyusunan dokumen RPHJP.
  - g. Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan ekspose penilaian dokumen RPHJP kepada para pihak dan tim penilai.
  - h. Melakukan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi dan pemberdayaan kepada masyarakat.
  - i. Melakukan peningkatan SDM aparatur dan masyarakat.
  - j. Memberikan bantuan sarana prasarana peningkatan ekonomi produktif kepada KUPS.
  - k. Mengembangkan perhutanan sosial berbasis hasil hutan non kayu.
  - l. Melakukan Koordinasi kepada instansi terkait Peraturan dan kebijakan yang kurang implementatif.
  - m. Melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat.
  - n. Membentuk masyarakat peduli api.
  - o. Peningkatan pemenuhan Saprasi penanggulangan karhutla.
  - p. Peningkatan kompetensi masyarakat peduli api dan pemegang izin.
  - q. Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
  - r. Melakukan patrol pengamanan hutan secara berkala.
  - s. Melakukan Pendidikan dan Latihan dasar polhut dan PPNS.
  - t. Melakukan koordinasi pihak berwajib terkait penanggulangan illegal logging.
  - u. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial.
  - v. Melakukan penghijauan, rehabilitasi, reklamasi, dan reboisasi serta pengelolaan DAS sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air.



- x. Melakukan pembinaan kepada pemegang izin yang punya kewajiban melakukan rehabilitasi dan reklamasi khususnya pemegang IPPKH.
  - y. Melakukan optimalisasi pengelolaan persemaian dalam rangka penyediaan bibit tanaman.
  - z. Melakukan updating data lahan kritis di Provinsi Kalimantan Utara.
  - aa. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terkait pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan.
  - bb. Meningkatkan sarana prasarana dalam rangka kelola lingkungan.
  - cc. Peningkatan penerbitan pertimbangan teknis untuk perijinan berusaha pengolahan hasil hutan kayu skala kecil, menengah dan besar.
  - dd. Mewajibkan kepada pemegang perijinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk menyediakan 5% produksi kayu bulat untuk pemenuhan industri kayu skala kecil dan menengah.
  - ee. Meningkatkan optimalisasi pemanenan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh pemegang berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu melalui pengendalian dan pengawasan.
2. Urusan Lingkungan Hidup
- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.
  - b. Meningkatkan ketaatan usaha/masyarakat/lembaga dan/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

### **3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**



Tujuan 16 TPB yaitu Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.17**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.</b>												
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.											
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Renstra Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk, dan KB	Persen	49		49	47	45	43	39	Indikator BAB 7 RPJMD: Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	
		Renstra Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk, dan KB	kasus	246		180	160	140	120	100	Indikator Renstra Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk, dan KB: Jumlah kasus kekerasan perempuan	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											
<b>Target 16.2. Menghentikan perilaku kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</b>												
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	RPJMD	Poin	4,16		4,00	3,70	3,35	3,10	3,00	Indikator Bab 8 RPJMD: Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	RPJMD	Poin	4,16		4,00	3,70	3,35	3,10	3,00	Indikator BAB 8 RPJMD: Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.											
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	RPJMD	Persen	49		49	47	45	43	39	Indikator BAB 7 RPJMD: Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Renstra Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk, dan KB	kasus	246		180	160	140	120	100	Indikator Renstra Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk, dan KB: Jumlah kasus kekerasan perempuan
<b>Target 16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.</b>											
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.										
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi										
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.										
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)										
<b>Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.</b>											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).										
<b>Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</b>											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	RPJMD	Persen	0,55		0,6	0,63	0,68	0,7	0,71	Indikator Bab 8 RPJMD: Rasio PAD
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persen			100	100	100	100	100	Indikator Renstra IV: Persentase Indeks Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Predikat	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator BAB IV Renstra: Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	RPJMD	Predikat	BB		BB	BB	BB	BB	A	Indikator Bab 5 dan 8 RPJMD: Predikat SAKIP
		Renstra Sekretariat Daerah	Persen			54,55	57,58	60,61	63,64	66,67	Indikator Bab 4 Renstra Sekretariat Daerah: Presentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan SAKIP Predikat "A"
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	RPJMD	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	A	Indikator Bab 5 dan 8 RPJMD: Indeks Reformasi Birokrasi
16.6.2.(a)	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Sekretariat Daerah	PD	33		33	33	33	33	33	Indikator Bab 6 Renstra Sekretariat Daerah: Jumlah Perangkat daerah yang menerapkan standar pelayanan



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</b>											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas PPPA, Kesejahteraan Keluarga dan KB	Orang	35		35	40	40	45	45	Indikator Renstra Dinas PPPA, Kesejahteraan Keluarga dan KB: Jumlah Kader Parpol/organisasi perempuan yang dibina
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang	30		30	40	40	50	50	Indikator Renstra: Jumlah wirausaha perempuan yang dibina
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi										
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Renstra Kesbangpol	Nilai		97,30	97,50	97,80	97,95	98,10	98,25	Bab 4 Renstra Kesbangpol: Nilai Aspek Kebebasan Sipil
16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan	- RPJMD - Renstra Kesbangpol	Nilai	78,20	78,55	78,90	79,25	79,80	80,21	80,75	Indikator Bab 5 RPJMD dan Bab 4 Renstra Kesbangpol: Skor Dimensi Kesenjangan
<b>Target 16.8. Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.</b>											
16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.										
<b>Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</b>											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	95,00		97,00	98,00	99,00	99,50	99,70	Indikator Bab 7 RPJMD dan bab 6 Renstra Dinas Dukcapil: Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	95,00		97,00	98,00	99,00	99,50	99,70	Indikator Bab 7 RPJMD dan bab 6 Renstra Dinas Dukcapil: Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	95,00		97,00	98,00	99,00	99,50	99,70	Indikator Bab 7 RPJMD dan bab 6 Renstra Dinas Dukcapil: Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun
<b>Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</b>											
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.										



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Renstra DP3AP2KB		49,2		49,00	47,00	45,00	43,00	41,00	Indikator Bab 6 Renstra DP3AP2KB: Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.											
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif											
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.											
<b>Target 16.a. Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.</b>												
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.											
<b>Target 16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.</b>												
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam rangka mencapai target indikator TPB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Arah kebijakan umum
  - d. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
  - e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik.
  - f. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
  - a. Mengoptimalkan penyuluhan/sosialisasi tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan berbagai forum dan ormas.
  - b. Mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta ormas keagamaan lainnya.
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Peningkatan partisipasi perempuan dan pemenuhan hak anak untuk terciptanya kesetaraan gender menuju kehidupan keluarga yang berkualitas.
  - b. Peningkatan partisipasi peran perempuan dibidang politik sosial dan ekonomi dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui instrumen kebijakan, pendampingan, pelayanan, pelembagaan dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi.
  - c. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui penguatan, pendampingan, pelayanan dan pembangunan jaringan kelembagaan untuk meningkatnya kualitas hidup anak.
  - d. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyediaan layanan dengan penguatan dan pengembangan lembaga layanan.
4. Unsur Penunjang Keuangan
  - a. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah.
  - b. Meningkatkan Kualitas Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja.



- c. Meningkatkan Konsolidasi Laporan Keuangan OPD.
  - d. Meningkatkan Kualitas Dokumen Anggaran.
  - e. Meningkatkan kualitas Evaluasi dan Pembinaan APBD.
  - f. Meningkatkan Penatausahaan Aset Daerah.
  - g. Meningkatkan Inventarisasi Aset Daerah.
5. Unsur Penunjang Perencanaan
- a. Meningkatkan kualitas verifikasi dokumen perencanaan PD.
  - b. Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data perencanaan.
6. Sekretariat Daerah
- b. Optimalisasi Capaian Perjanjian Kinerja PD.
7. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi administrasi kependudukan.
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta fasilitas layanan administrasi kependudukan.
  - c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi Kependudukan.
  - d. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan.

### 3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan



Tujuan 17 TPB yaitu Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan terdiri atas beberapa indikator. Dalam mendukung pencapaian tujuan, maka Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target indikator dalam periode pembangunan tahun 2022 sampai dengan 2026. Sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.18**  
**Target dan Indikator Tingkat Dampak**  
**Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</b>											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	RPJMD	Rupiah		2.879.799.638.971	3.137.682.817.188	3.262.544.100.681	3.452.422.228.247	3.621.724.750.254	3.810.411.597.153	Bab 3 RPJMD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.										
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	RPJMD	Rupiah		444.138.825.160	483.911.012.868	503.167.819.143	532.451.887.159	558.562.670.077	587.663.012.118	Bab 3 RPJMD
<b>Target 17.2. Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.</b>											
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB										
<b>Target 17.3. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.</b>											
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.										
<b>Target 17.4. Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.</b>											
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.										



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Target 17.6. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</b>												
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga											
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)											
<b>Target 17.8. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</b>												
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian	Persen		53,66	78,04	87,8	95,12	95,12	95,12	Indikator BAB 7 RPJMD: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	
<b>Target 17.9. Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.</b>												
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST											
17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular											
<b>Target 17.10. Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.</b>												
17.10.1(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati											
<b>Target 17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</b>												
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	RPJMD	Persen	-9,96		6,00	6,00	7,00	7,00	8,00	Indikator Bab 8 RPJMD: Pertumbuhan nilai ekspor non migas	
<b>Target 17.13. Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.</b>												
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.											
<b>Target 17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.</b>												



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.											
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).											
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.											
<b>Target 17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</b>												
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.											
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.											
<b>Target 17.19. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</b>												
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persen	95		95	95	96	96	96	Indikator Renstra Diskominfo: Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	
		Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Perangkat Daerah	38		38	38	39	39	40	Indikator Renstra Diskominfo: Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2026

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)		Target Pencapaian					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Perangkat Daerah			20		20			Indikator Renstra Diskominfo: Jumlah perangkat daerah yang menyusun laporan metadata Statistik Sektoral
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.										
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	95		97	98	99	99,5	99,7	Indikator Bab 7 RPJMD dan bab 6 Renstra Dinas Dukcapil: Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam rangka mencapai target indikator TPB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Unsur Penunjang Keuangan
  - a. Updating database potensi sumber penerimaan pendapatan daerah.
  - b. Meningkatkan sinergisitas implementasi regulasi dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan daerah.
  - c. Penggunaan aplikasi pendukung pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis internet.
  - d. Meningkatkan standar pelayanan.
2. Urusan Komunikasi dan Informatika
  - a. Percepatan Informasi dalam pelayanan publik.
  - b. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pembangunan teknologi dan informasi terpadu.
  - c. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder penyelenggara telekomunikasi guna tercapainya kesepakatan penyediaan layanan telekomunikasi.
  - d. Optimalisasi Pengusulan untuk pembangunan BTS melalui: 1) Penyediaan data dan aset penunjang penyediaan layanan telekomunikasi. 2) Survey lokasi/lahan untuk penyediaan pembangunan BTS. 3) Mendorong penerapan ducting bersama (pipa air, listrik dan telekomunikasi) Dukungan regulasi/kebijakan kemudahan perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan standarisasi gedung dan bangunan.
  - e. Pembangunan infrastruktur alternatif penguat jangkauan telekomunikasi.
3. Urusan Statistik
  - a. Mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dalam rangka penyelenggaraan SDI pusat dan daerah.
4. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi administrasi kependudukan.
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta fasilitas layanan administrasi kependudukan.
  - c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.



- d. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan.
5. Urusan Perdagangan
  - a. Mengoptimalkan pembangunan jaringan infrastruktur dengan baik dan merata
  - b. Mempertahankan Subsidi Ongkos Angkut Barang
  - c. Memantau pelaksanaan distribusi barang
  - d. Melakukan pengawasan barang beredar yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan
  - e. Meningkatkan dalam pemberian informasi ke masyarakat terkait perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen
  - f. Melaksanakan sosialisasi menggunakan produk dalam negeri
  - g. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur ekspor dan impor
  - h. Melakukan pelatihan kepada pelaku ekspor agar dapat memenuhi standar ekspor
  - i. Meningkatkan promosi dan kualitas Produk unggulan Kalimantan Utara yang masih kurang dikenal di pasar internasional



## **BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sementara tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran (output) yang tercantum dalam RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBD maupun nonpemerintah.

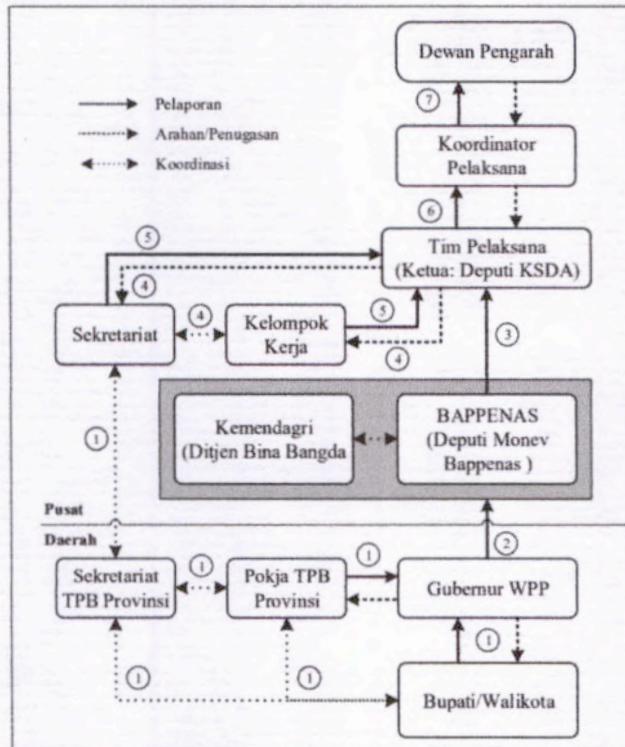
#### **4.1.1. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)**

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihakpihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.



**Gambar 4.1**

**Alur Informasi Untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs**



Sumber: Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB Edisi II, Bappenas

Alur pelaporan pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs (Langkah 1).
2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).



3. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (Langkah 3).
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (Langkah 6).
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 Ayat 3 Perpres Nomor 59 Tahun 2017 (Langkah 7).

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi adalah: 1. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs periode berjalan; 2. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir; 3. Data program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan TPB/SDGs termasuk capaian target dan realisasi anggarannya; dan 4. Dokumen pencapaian kinerja nonpemerintah.

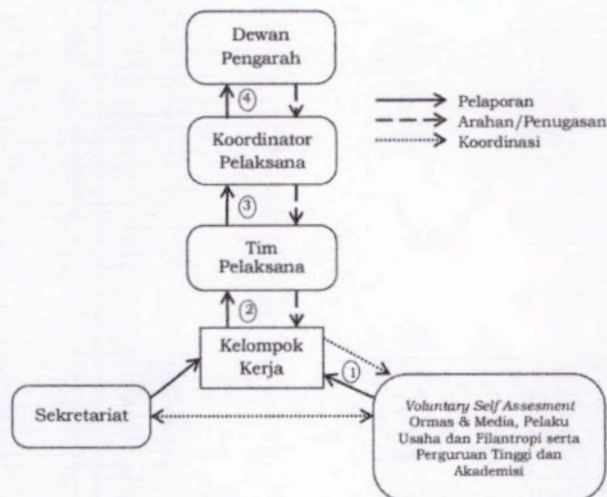
#### **4.1.2. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi NonPemerintah**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati.



**Gambar 4.2**

**Alur Informasi Pemantauan Organisasi NonPemerintah**



Sumber: Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB Edisi II, Bappenas

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para



anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

#### **4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs**

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 khususnya Pasal 17 tentang kewajiban menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, selanjutnya ditetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 3 menyatakan bahwa pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan Ayat 4 menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli. Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari. Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

#### **4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi**

Setiap akhir tahun pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah daerah menyusun laporan pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs yang mengacu pada hasil kompilasi Form 1 sampai dengan Form 6 sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB. Laporan pencapaian TPB/SDGs memuat sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Ringkasan Status

Pencapaian TPB/SDGs (Ringkasan narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada FORM 1)
3. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs Per Tujuan
  - a. Keadaan dan Kecenderungan (tren)
  - b. Tantangan dan pembelajaran
  - c. Kebijakan dan strategi
  - d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs
4. Penutup



Proses penyusunan laporan harus melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari penyusunan jadwal kerja, penyusunan outline laporan, pembahasan setiap bab laporan dan finalisasi laporan. Selama proses penyusunan laporan, pihak pemerintah dan organisasi nonpemerintah dapat saling memberikan revidi umpan balik (*feedback*) atas proses pelaksanaan TPB/SDGs serta hasil capaian indikator, program dan kegiatan TPB/SDGs baik dari sisi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok yang Terarah. Waktu penyampaian laporan pencapaian TPB/SDGs baik pihak pemerintah maupun nonpemerintah dan mekanisme alur penyampaian laporan secara resmi mengikuti penjelasan pada subbab sebelumnya.

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS telah menyiapkan laman <http://sdgs.bappenas.go.id> sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya. Hal yang sama juga diharapkan kepada pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk melakukan publikasi baik secara online maupun offline terhadap hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam program kegiatan rencana aksi TPB/SDGs.



## BAB V. PENUTUP

Pencapaian sasaran TPB Provinsi Kalimantan Utara dilakukan antara lain melalui penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan. RAD TPB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dari RAD Tahun 2018-2021. Penyusunan RAD TPB Provinsi Kalimantan Utara dilakukan secara inklusif dengan melibatkan kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan. Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB) merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Rencana aksi ini memuat target indikator kinerja TPB mulai tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai perodesasi RPJMD. Guna mendukung pencapaian target-target indikator TPB, ditetapkan serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu terdapat pula dukungan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan RPJMD dan Renstra PD masing-masing; serta program dan kegiatan dari nonpemerintah (non stateactor).

Setelah pelaksanaan RAD periode lalu, komitmen pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Utara semakin kuat tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga nonpemerintah. Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah juga terus meningkat, antara lain melalui pembentukan SDGs Center di Universitas Kalimantan Utara dan di Universitas Borneo. Peran lembaga kemasyarakatan, filantropi, dan perusahaan juga terus meningkat, yang ditunjukkan dengan ikut sertanya pihak nonpemerintah tersebut dalam proses penyusunan RAD TPB. Penyampaian rencana program dan kegiatan dalam RAD TPB merupakan dukungan pihak nonpemerintah dalam pelaksanaan TPB/SDGs.

Berbagai komitmen pemangku kepentingan pada periode 2022 sampai dengan 2026 tertuang dalam berbagai program dan kegiatan (serta sub kegiatan) dalam dokumen RAD TPB/SDGs Tahun 2021-2026 yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan pencapaian target-target TPB/SDGs. Program dan kegiatan yang mendukung



pencapaian target-target pada 17 Tujuan TPB/SDGs juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD serta 10 prioritas pembangunan Kalimantan Utara. Diharapkan pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sekaligus akan mendukung pencapaian TPB. Demikian pula dengan pelaksanaan rencana program dan kegiatan oleh nonpemerintah yang telah dimuat dalam RAD ini diharapkan dapat mendorong pencapaian target dalam TPB.

Dalam rangka memastikan RAD TPB/SDGs berjalan sesuai dengan rencana, maka diperlukan kaidah pelaksanaan, antara lain:

- a. Gubernur bersama seluruh bupati/walikota, Pemerintah Pusat serta pemangku kepentingan nonpemerintah berkolaborasi dan bersinergi dalam melaksanakan RAD TPB.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkannya secara berkala.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyusun laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs setiap akhir tahun pelaksanaan.
- d. Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota serta nonpemerintah dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD TPB.

Demikian RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan TPB tahun 20220 sampai dengan 2026 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Diharapkan keterlibatan dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangan masing-masing.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. SUPRIANSYAH, M. AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	RISDLANTO, S.Pi, M.Si	KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG	